Usulan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

Sebagai dukungan substansi Pusat Kajian Daerah dan Anggaran
Sekretariat Jenderal DPD RI untuk penyusunan
Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN 2022

SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
2021

Usulan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

PENASEHAT
Dr. Rahman Hadi, M.Si.
Ir. Sefti Ramsiaty, MM.

PENANGGUNG JAWAB
Purwanto, S.H.

EDITOR
Yulia Indrianingtyas, S.IP., M.Si.

PENYUSUN
Dr. Rasidin Karo Karo S., M.Si.
Rama Mahesa, SE., MM.
Arief Maulana, S.IP.
Rindang Mustikawati, SE.

TATA LETAK & DESAIN
Yulia Indrianingtyas, S.IP., M.Si.

Sekretariat Jenderal DPD RI
Gedung B DPD RI
Jl. Jend. Gatot Subroto - Senayan - Jakarta
Telp: 021-57897389, 57897328, 57897331
Fax: 021-57897389
Email: pusatkajiandaerah@gmail.com
piapusda@dpd.go.id
disasmasda@gmail.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GRAFIK viii
PENGANTAR ix

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Pengkajian 2
1.3 Metodologi 2

BAB II 4
PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA 4
2.1 Kondisi Ekonomi Dunia Triwulan IV Tahun 2019 Sebelum Terjadinya Pandemi Covid-19 4
2.1.1. Kesepakatan Dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang Menunjukkan Perkembangan Positif. 4
2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sebagian Besar Negara Melambat 5
2.1.3. Aksi Pemotongan Suku Bunga di Beberapa Negara untuk Menjaga Kondisi Perekonomian Dalam Negeri 7
2.1.4. Harga Komoditas Energi Meningkat 8
2.1.5. Harga Komoditas Non Migas Secara Umum Meningkat 9
2.2 Kondisi Ekonomi Dunia Tahun 2020 Setelah Terjadinya Pandemi Covid-19 9
2.2.1. Guncangan Ekonomi Global Dampak Katastrofe Covid-19 9
2.2.2. Perbaikan Ekonomi Global Triwulan IV 2020 12
2.3 Isu Krusial Ekonomi Dunia di Tahun 2021 13
2.3.1. Kebijakan Moneter Akomodatif Menopang Pemulihan Ekonomi Global di 2021 13
2.3.2. Kebijakan Fiskal Ekspansif Terus Berlanjut untuk Mitigasi Risiko Dampak Covid-19 dan Mendorong Pemulihan Ekonomi 14
2.3.3. Pemulihan Ekonomi Dunia Berlanjut di 2021 sebagai Respon Implementasi Vaksinasi Covid-19 secara Global dan Berbagai Stimulus Kebijakan Fiskal dan Moneter di Banyak Negara 15
2.3.4. Sinergitas Negara Maju dan Berkembang dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Global 15
2.3.5. Aliran Modal Asing Masuk Signifikan ke Negara Berkembang 16

BAB III 17
PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA 17
3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 17
3.2 Kondisi Inflasi Tahun 2020 19

3.3 Nilai Tukar Rupiah Stabil 20
3.4 Harga Minyak Indonesia Mengalami Penurunan 21
3.5 Target *Lifting* Minyak Tak Terpenuhi 22
3.6 Angka Kemiskinan dan Pengangguran Berkorelasi Naik 22
3.7 Laju IPM Melambat 24

BAB IV 26
USULAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022 26
4.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 26
4.2 Usulan Program Prioritas Daerah Tahun 2022 Berdasarkan Aspirasi Masyarakat dan Daerah 27
4.3 Peningkatan Akselerasi Pemulihan Kesehatan Masyarakat 28
4.4 Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) 30
4.5 Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 33
4.6 Pembangunan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Mitigasi Bencana 36
4.7 Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan 39
4.8 Penguatan Ketahanan Pangan Nasional 42

BAB V 46
PROYEKSI INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAH TAHUN 2022 46
5.1 Asumsi 46
5.2 Perkembangan Makro Ekonomi Daerah Tahun 2020 47
5.3 Proyeksi Makro Ekonomi Daerah 50
5.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 50
5.3.2 Kemiskinan 52
5.3.3 Pengangguran 54
5.3.4 Inflasi Daerah 58

BAB VI 61
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 61

DAFTAR PUSTAKA 63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Suku Bunga 2019 Di Beberapa Negara 7
Tabel 2. Harga Komoditas 13
Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran 18
Tabel 4. Persentase Dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau (Maret 2020) 23
Tabel 5. Data Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Periode September 2020 -Maret 2021 27
Tabel 6. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan 29
Tabel 7. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Ketahanan Ekonomi 31
Tabel 8. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Pemerataan Kesejahteraan 34
Tabel 9. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Lingkungan Hidup Dan Mitigasi Bencana 37
Tabel 10. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan 40
Tabel 11. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Ketahanan Pangan 43
Tabel 12. Asumsi Baseline Ekonomi Makro 46
Tabel 13. Asumsi Baseline, Moderat Dan Optimis 46
Tabel 14. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020 (Persen) 48
Tabel 15. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Tahun 2021-2022 52
Tabel 16. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Daerah Provinsi Tahun 2021-2022 54
Tabel 17. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Provinsi Tahun 2021-2022 (Persen) 58
Tabel 18. Proyeksi Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2021-2022 (Persen) 60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2018-2019 5
Grafik 2. Perkembangan Harga Minyak Mentah Dunia 8
Grafik 3. Perkembangan Harga Gas Alam 8
Grafik 4. Perkembangan Kasus Covid-19 Global 10
Grafik 5. Kenaikan Defisit Fiskal Di Negara Maju Dan Berkembang Tahun 2020 11
Grafik 6. *Quantitative Easing* (Pelonggaran Likuiditas Tidak Konvensional) Negara Berkembang 2020 11
Grafik 7. Volume Perdagangan Dunia 12
Grafik 8. *Dry Baltic Index* 12
Grafik 9. Indeks Keyakinan Konsumen 2020 15
Grafik 10. Produk Domestik Bruto (Pdb) Indonesia Tahun 2014-2020 18
Grafik 11. Data Inflasi 2017-2020 20
Grafik 12. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah 21
Grafik 13. Rata-Rata Harga Minyak Mentah Dunia 21
Grafik 14. Data Lifting Minyak Dan Gas 2015-2020 (Dalam Ribu Barrel/Hari) *(Outlook) 22
Grafik 15. Laju Kemiskinan Nasional 2015-2020 23
Grafik 16. Jumlah Pengangguran Nasional (Dalam Juta Penduduk) 24
Grafik 17. Data Indeks Pembangunan Indonesia Per Provinsi 25
Grafik 18. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi 2021 51
Grafik 19. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Daerah Provinsi Tahun 2021 53
Grafik 20. Proyeksi Pengangguran Terbuka Daerah Provinsi Tahun 2021 57
Grafik 21. Proyeksi Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2021 59

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kami diberikan kesempatan kembali untuk menyusun buku kajian siklus APBN dengan segala kemudahan dan kelancaran. Buku kajian siklus APBN merupakan sebuah produk akademis ilmiah yang disusun secara berkelanjutan setiap masa pembahasan APBN oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran-Sekretariat Jenderal DPD RI dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada DPD RI melalui Komite IV sebagai bahan masukan penyusunan pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Buku "Usulan Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022" ini merupakan buku pertama dari trilogi kajian yang saling terkait dalam siklus penyusunan APBN Tahun 2022 yang terdiri dari pembahasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dan penyusunan RUU APBN Tahun 2022.

Materi pembahasan dalam buku ini merupakan sebuah analisa sinkronisasi dokumen RKP Tahun 2022 yang dikeluarkan Pemerintah dengan hasil analisa kebutuhan daerah yang disarikan dari aspirasi masyarakat dan daerah (asmasda) yang diperoleh DPD RI dari hasil serap aspirasi pada masa reses. Secara umum, terdapat 6 (enam) klaster program pembangunan daerah yang dapat disinkronkan dengan program Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2022 yang bertemakan "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" yaitu: peningkatan akselerasi pemulihan kesehatan masyarakat, penguatan ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi lokal, pembangunan daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, pembangunan ketahanan lingkungan hidup dan meningkatkan mitigasi bencana, penguatan stabilitas politik, hukum dan keamanan, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Kehadiran sebuah produk kajian akademis ilmiah yang dihasilkan oleh unit kerja *think tank* Pusat Kajian Daerah dan Anggaran diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan yang diberikan kepada DPD RI sesuai visi Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai sistem pendukung yang profesional, akuntabel, dan modern kepada DPD RI.

Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan sumbangsih khasanah keilmuan bagi pembaca dan tetap menjaga optimisme dalam setiap karya kepada bangsa dan negara demi tercapainya cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Jakarta, April 2021
Sekretaris Jenderal DPD RI,

Dr. Rahman Hadi, M.Si.
NIP. 196909141990031004

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 sebagai bagian dari proses penyusunan APBN tahun 2022 memasuki tahun ke-3 dari RPJMN Periode 2020-2024. Untuk merealisasikan visi misi Presiden terpilih di dalam RPJMN, secara umum Pemerintah menyusun dan menetapkan target setiap tahun perencanaan. RKP secara umum diajukan Pemerintah kepada DPR untuk dibahas antara bulan Februari-Maret, dimana peran DPD RI sesuai kewenangan konstitusionalnya dalam memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah.

Sejalan dengan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah dalam menyusun Rancangan APBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan fungsinya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka memberikan Pertimbangan terhadap RUU APBN wajib mencermati rencana kerja Pemerintah yang meliputi perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dalam hal ini, DPD RI melalui Komite IV memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai program pembangunan daerah pada tahap pembicaraan pendahuluan bersama Pemerintah.

Masukan dimaksud disusun berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima DPD RI, baik pada masa sidang maupun masa kegiatan di daerah. Mempertimbangkan bahwa aspirasi yang diterima DPD RI adalah aspirasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat dan daerah, diharapkan masukan DPD RI melalui Komite IV dapat betul-betul dijadikan bahan masukan oleh Pemerintah sehingga dokumen RKP Tahun 2022 mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat di seluruh daerah.

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) sebagai unit pendukung keahlian sesuai tugasnya menyusun kajian berupa usulan pokok-pokok kebijakan pembangunan di daerah, sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi Komite IV dalam menyampaikan masukan kepada Pemerintah.

Secara umum usulan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah dalam RKP Tahun 2022 disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diserap Anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah selama tahun 2020 di 34 provinsi, data sekunder hasil rilis lembaga keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri, dan model analisis postur anggaran negara yang dikembangkan oleh Puskadaran.

1.2 Tujuan Pengkajian

Dari latar belakang tersebut, tujuan disusunnya kajian ini adalah:

1. Memproyeksikan indikator kebijakan ekonomi makro dan indikator kinerja nasional dan daerah pada tahun 2022; dan
2. Menyampaikan usulan pokok-pokok kebijakan program prioritas daerah dalam RKP tahun 2022 kepada Komite IV, sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam menyampaikan masukan kepada Pemerintah terkait penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 sebagai bagian dari tahapan penyusunan RUU APBN.

1.3 Metodologi

Model yang dibangun dalam melakukan proyeksi indikator kinerja ekonomi daerah adalah model sistem persamaan simultan. Secara umum persamaan perilaku (structural behavioral) dalam bentuk matematis dituliskan sebagai berikut:

$$q_{ijt} = \alpha_0 + \alpha_1 x_{ijt} + \alpha_2 x_{ijt} + \cdots + \alpha_k x_{nmt} + \varepsilon_{ijt}$$

Dimana:

k = 1,2, ... , k yaitu jumlah variabel penjelas di dalam persamaan.

i = 1,2,… , n yaitu jumlah persamaan perilaku di dalam sistem dalam kajian ini terdiri dari 10 persamaan

j = 1,2,…, m yaitu jumlah provinsi didalam persamaan. Dalam kajian ini jumlah provinsi adalah 34 provinsi

α_i = koefisien parameter dari variabel 1,2,…,k

ε_{ijt} = error term dari persamaan *i* di provinsi *j* pada tahun ke *t*

q_{ijt} = variabel endogen pada persamaan ke *i* di provinsi *j* pada tahun ke *t*

x_{ijt} = variabel exogen pada persamaan ke *i* di provinsi *j* pada tahun ke *t*

t = tahun

PDRB dearah diperoleh dengan formulasi:

$$Y_{jt} = C_{jt} + I_{jt} + G_{jt} + X_{jt} - M_{jt}$$

Dimana Y_{jt} adalah PDRB di provinsi *j* pada tahun ke *t*, C adalah konsumsi diprovinsi *j* pada tahun ke *t*, G adalah pengeluaran pemerintah pada provinsi *j* pada tahun ke *t*, X_{jt} dan M_{jt} adalah masing ekspor dan impor daerah provinsi *j* pada tahun ke *t*.

Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$G_{jt} = \frac{Y_{jt-0} - Y_{jt-1}}{Y_{jt-0}} \; x \; 100$$

Dimana G_{jt} adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di provinsi *j* pada tahun ke *t*. Total seluruh persamaan adalah sebanyak 408 persamaan, yang terdiri dari 340 persamaan perilaku dan 68 persamaan indentitas.

Gambar 1. Tahapan dan Prosedur Analisis Model APBN

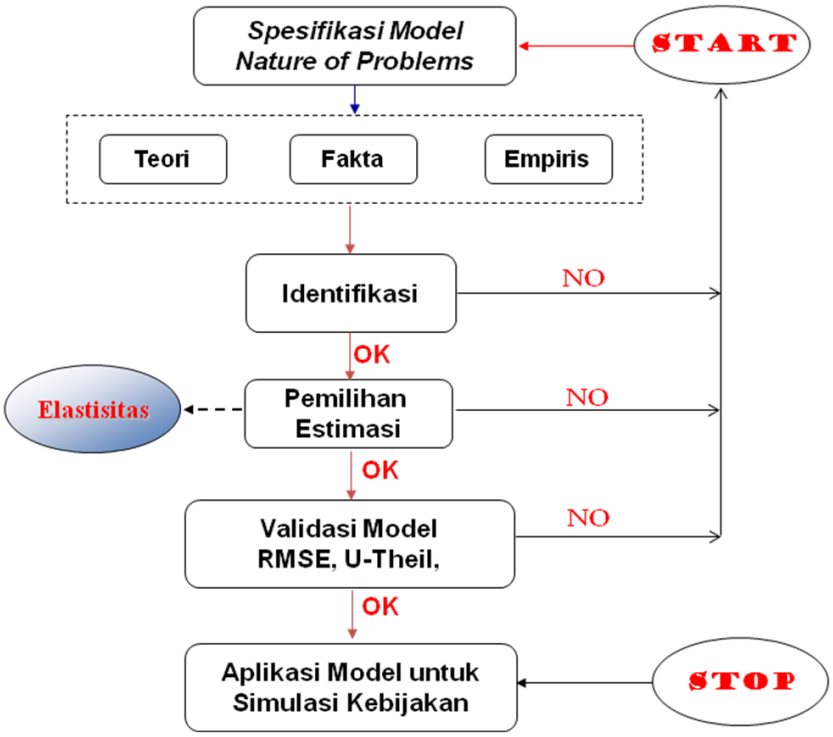

Secara umum model didefinisikan sebagai abstraksi dari dunia nyata, yang tentu terkait dengan fenomena RKP/APBN itu sendiri. Model dibangun dari teori, fakta dan empiris. Jika model teridentifikasi, maka dilakukan pemilihan teknik estimasi. Teknik estimasi dalam kajian ini menggunakan metode *two stages least squares* (2SLS). Model divalidasi menggunakan RMSPE dan *U-Theil* dan jika model dinyatakan valid maka model dapat digunakan sebagai analisis simulasi kebijakan dan melakukan prediksi terhadap nilai endogen.

BAB II
PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA

2.1 Kondisi Ekonomi Dunia Triwulan IV Tahun 2019 Sebelum Terjadinya Pandemi Covid-19

Kondisi perekonomian dunia sejak tahun 2019 mengalami tren perlambatan seperti periode sebelumnya akibat persaingan dagang antara negara adidaya dunia, Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang membuat perdagangan dunia menjadi stagnan. Kenaikan neraca perdagangan di beberapa komoditi utama dunia memang terjadi namun pergerakannya lamban, sebaliknya beberapa komoditi utama perdagangan dunia mengalami penurunan nilai perdagangan.

Kondisi tersebut secara umum mempengaruhi kondisi ekonomi global yang tercermin dari beberapa aspek sebagai berikut:

2.1.1. Kesepakatan Dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang Menunjukkan Perkembangan Positif.

Pada Triwulan IV tahun 2019, Tiongkok tumbuh 6,0 persen (YoY), relatif stagnan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Singapura masing-masing tumbuh sebesar 2,3; 2,2; dan 0,8 persen (YoY). Sementara itu, perekonomian Jepang terkontraksi sebesar 0,4 persen (YoY). Perlambatan ekonomi juga dialami Indonesia. Perekonomian Indonesia tumbuh 4,97 persen (YoY) pada Triwulan IV tahun 2019, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya sebesar 5,02 persen (QoQ). Pertumbuhan pada triwulan ini masih didorong oleh sektor jasa yang tumbuh tinggi meskipun kontribusinya pada PDB masih relatif kecil. Pertumbuhan paling tinggi berturut-turut adalah sektor jasa lainnya, jasa perusahaan, dan informasi komunikasi. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terjadi pada semua komponen, dengan ekspor dan impor kembali mengalami kontraksi. Secara kewilayahan, sebagian besar wilayah di Indonesia tumbuh positif, kecuali Maluku dan Papua, yang meskipun masih terkontraksi tetapi sudah lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Harga rata-rata komoditas energi pada Triwulan IV tahun 2019 tidak berubah secara signifikan. Harga minyak mentah dan gas alam meningkat terbatas dibandingkan triwulan sebelumnya, sedangkan harga batubara masih turun meskipun tipis. Sementara itu, harga komoditas nonmigas meningkat terutama pada komoditas pertanian. Peningkatan harga juga terjadi pada komoditas logam mulia. Harga rata-rata emas pada Triwulan IV tahun 2019 naik 20,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2018.

Perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok menjadi penentu arah ekonomi dunia pada Triwulan IV tahun 2019. Pada Oktober 2019, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bersepakat melakukan perundingan dagang kembali dan melaksanakan perjanjian fase I dan disepakati tidak ada kenaikan bea masuk bagi kedua negara selama perundingan dagang diselenggarakan. Penandatanganan perjanjian dagang dijadwalkan dilaksanakan pada bulan November 2019.

Namun pada bulan November 2019, hubungan kedua negara justru kembali memanas setelah Tiongkok menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menghapuskan seluruh tarif yang telah dinaikkan. Amerika tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan mengancam akan menaikkan tarif bea masuk ke negaranya. Tiongkok mempertimbangkan untuk menunda kelanjutan pembahasan perjanjian dagang hingga agenda politik di AS selesai.

Perjanjian dagang kembali menunjukkan perkembangan positif pada akhir tahun 2019. Kondisi tersebut tercermin dari sikap kedua negara yang melunak satu sama lain. Tiongkok melakukan pelonggaran bea masuk atas sejumlah produk impor dari Amerika Serikat, sementara itu Amerika Serikat memotong tarif yang sudah berlaku dan menunda pemberlakuan tarif impor dari Tiongkok. Kedua negara akhirnya sepakat akan melakukan penandatanganan kesepakatan dagang pada minggu pertama bulan Januari 2020.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sebagian Besar Negara Melambat

Ketidakpastian global mulai berkurang pada Triwulan IV tahun 2019, sejalan dengan kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun perekonomian dunia masih melambat pada Triwulan IV tahun 2019 meskipun perlambatan yang terjadi tidak setajam periode sebelumnya.

Grafik 1. Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara Tahun 2018-2019

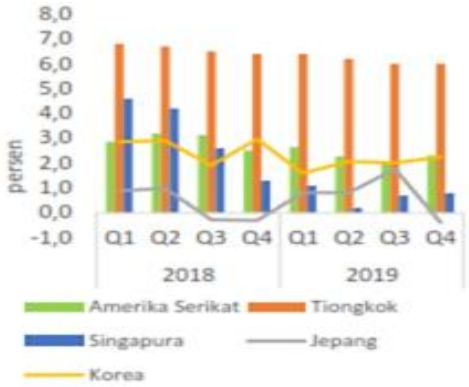

Sumber: CEIC

Perekonomian Tiongkok mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada Triwulan IV tahun 2019 sebesar 6,0 persen, relatif stagnan dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, pertumbuhan triwulan tahun ini lebih rendah dibandingkan Triwulan IV tahun 2018 yang mencapai 6,4 persen (YoY). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh melemahnya permintaan dari dalam dan luar negeri serta tekanan yang ditimbulkan oleh perang dagang dengan Amerika Serikat. Pertumbuhan Tiongkok selama tahun 2019 mencapai 6,1 persen, paling lambat selama 26 tahun terakhir. Meski begitu, angka tersebut masih dalam target Pemerintah yang berada pada kisaran 6-6,5 persen.

Perekonomian Amerika Serikat juga mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat adalah sebesar 2,3 persen (YoY), lebih lambat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (2,5 persen, YoY), namun membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 2,1 persen (QoQ). Semua komponen pengeluaran menunjukkan pertumbuhan yang meningkat kecuali impor yang turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didorong oleh meningkatnya konsumsi pakaian dan alas kaki serta jasa kesehatan. Sementara penurunan inventori terjadi pada perdagangan retail terutama kendaraan bermotor.

Perekonomian Korea Selatan juga mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan Triwulan IV tahun 2018. Pada triwulan ini, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan mencapai 2,2 persen (YoY), paling lambat dalam 10 tahun terakhir. Perlambatan ini terutama disebabkan turunnya kinerja ekspor, terutama penurunan harga pada komoditas ekspor yang lebih besar dibandingkan impor.

Hal yang sama terjadi pada Singapura yang juga mengalami pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam 10 tahun terakhir. Pada Triwulan IV tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Singapura adalah sebesar 0,8 persen (YoY), melambat dibandingkan Triwulan IV tahun 2018 yang tumbuh sebesar 1,3 persen (YoY). Perlambatan terutama terjadi pada sektor manufaktur, namun diimbangi dengan pertumbuhan sektor jasa yang mengalami akselerasi.

Perekonomian Jepang mengalami tekanan. Pertumbuhan Jepang pada Triwulan IV tahun 2019 terkontraksi sebesar 0,4 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi yang terjadi pada periode yang sama tahun 2018 (0,3 persen, YoY). Hal ini disebabkan oleh turunnya konsumsi rumah tangga pada triwulan terakhir yang dipengaruhi oleh peningkatan pajak konsumsi menjadi 10 persen pada bulan Oktober 2019. Di samping itu juga terjadi penurunan permintaan domestik akibat bencana topan Hagibis

yang terjadi pada bulan Oktober 2019, dan melemahnya permintaan dari luar negeri yang ikut menekan pertumbuhan ekonomi Jepang.

2.1.3. Aksi Pemotongan Suku Bunga di Beberapa Negara untuk Menjaga Kondisi Perekonomian Dalam Negeri

Sebagian besar negara sudah mulai mengurangi aksi pemotongan suku bunga pada Triwulan IV 2019. Bank sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga untuk ketiga kalinya sepanjang tahun 2019 pada Oktober sebesar 25 bps. Suku bunga Amerika Serikat pada akhir Triwulan IV 2019 sebesar 1,50-1,75 persen. *The Fed* mengisyaratkan untuk menghentikan penurunan suku bunga kecuali kondisi perekonomiannya memburuk. Sementara itu, bank sentral Brazil dan Rusia juga memangkas suku bunga sebanyak dua kali pada bulan Oktober dan Desember 2019. Rusia memangkas suku bunga sebesar 50 bps pada bulan Oktober 2019 dan 25 bps pada bulan Desember 2019 menjadi 6,25 persen. Bank central Brazil menurunkan suku bunga 100 bps pada Triwulan IV tahun 2019, membuat suku bunga menjadi 4,50 persen pada akhir tahun.

Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 bps pada Oktober 2019 menjadi sebesar 5,00 persen sepanjang Triwulan IV tahun 2019. Sedangkan Thailand menurunkan suku bunga sebesar 25 bps pada November 2019. Di sisi lain, Bank sentral Filipina, Malaysia, dan Vietnam menahan tingkat suku bunganya.

Tabel 1. Suku Bunga 2019 di Beberapa Negara

	Okt	Nov	Des
BRIC			
Brazil	5,00	5,00	4,50
Rusia	6,50	6,50	6,25
India	5,15	5,15	5,15
Tiongkok	4,25	4,25	4,25
ASEAN-5			
Indonesia	5,00	5,00	5,00
Thailand	1,50	1,25	1,25
Filipina	4,00	4,00	4,00
Malaysia	3,00	3,00	3,00
Vietnam	6,00	6,00	6,00
Negara Maju			
Kawasan Eropa	0,00	0,00	0,00
Amerika Serikat	1,50-1,75	1,50-1,75	1,50-1,75
Jepang	-0,1	-0,1	-0,1

Sumber: Bloomberg, 2020

2.1.4. Harga Komoditas Energi Meningkat

Harga minyak mentah sepanjang Triwulan IV tahun 2019 terus meningkat karena didorong isu kesepakatan dagang antara AS dengan Tiongkok yang masih belum jelas. Disisi lain, anggota OPEC dan negara penghasil minyak lainnya sepakat menambah pemangkasan produksi pada tahun 2020 sebesar 500 ribu barel per hari. Kesepakatan tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2020 dengan total pemangkasan sebesar 1,7 juta barrel per hari.

Grafik 2. Perkembangan Harga Minyak Mentah Dunia

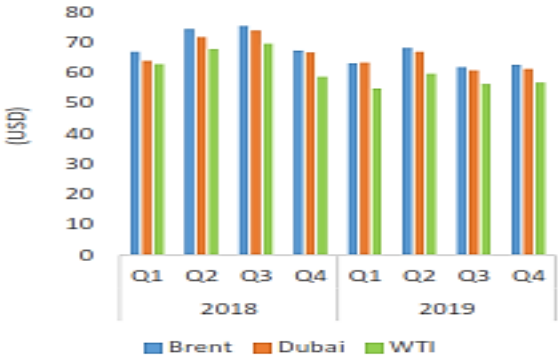

Sumber: World Bank, 2020

Grafik 3. Perkembangan Harga Gas Alam

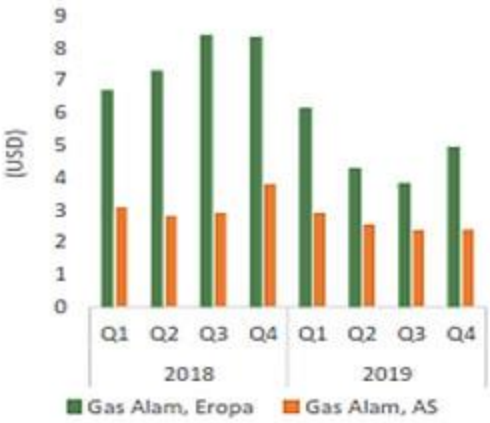

Sumber: World Bank, 2020

Harga gas alam Eropa meningkat menjadi USD4,9 per mmbtu pada Triwulan IV tahun 2019. Sementara itu, harga rata-rata gas alam Amerika Serikat menguat terbatas dari USD2,39 pada Triwulan III tahun 2019 menjadi USD2,41 per mmbtu pada Triwulan IV tahun 2019. Hal ini tidak terlepas dari perkiraan yang menyebutkan bahwa cuaca dingin akan lebih ekstrim dan panjang pada sisa musim dingin ini.

Harga rata-rata batubara kembali turun dari USD67,9 per metrik ton pada Triwulan III tahun 2019 menjadi USD67,5 per metrik ton pada Triwulan IV tahun 2019. Turunnya harga batubara disebabkan oleh rendahnya permintaan seiring dengan kondisi perekonomian global yang belum stabil.

2.1.5. Harga Komoditas Non Migas Secara Umum Meningkat

Beberapa komoditas pertanian yang mengalami peningkatan harga adalah cokelat, kedelai, minyak kelapa sawit, dan karet. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price* - ICP) pada Triwulan IV tahun 2019 meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun, jika dibandingkan Triwulan IV tahun 2018, harga ICP turun sebesar 2,6 persen.

Aluminium dan nikel mengalami penurunan. Harga aluminium kembali turun sejak Triwulan III tahun 2018. Pada Triwulan IV tahun 2019, harga rata-rata aluminium sebesar USD1.757 per metrik ton, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD1.764 per metrik ton. Sementara itu, harga nikel turun dari USD15.651 per metrik ton pada Triwulan III menjadi USD15.349 per metrik ton pada triwulan ini.

Adapun harga logam mulia kembali mengalami peningkatan. Ketidakpastian global yang tidak kunjung mereda menyebabkan harga emas sebagai aset *safe haven* terus meningkat. Harga emas meningkat dari USD1.475 per troy ons menjadi USD1.482 per troy ons. Dibandingkan dengan harga emas pada Triwulan IV tahun 2018, pada triwulan ini harga emas meningkat sebesar 20,6 persen (YoY).

2.2 Kondisi Ekonomi Dunia Tahun 2020 Setelah Terjadinya Pandemi Covid-19

2.2.1. Guncangan Ekonomi Global Dampak Katastrofe Covid-19

Pandemi Covid-19 telah membuat ekonomi dunia mengalami penurunan tajam pada kinerja ekonomi global di Triwulan I-III tahun 2020. Namun memasuki Triwulan IV aktivitas ekonomi global mulai bergerak meningkat, didorong oleh implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter.

Pemulihan ekonomi global tersebut ditopang terutama oleh Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), serta sejumlah negara maju seperti Eropa dan Jepang, dan negara berkembang seperti India dan ASEAN. Perkembangan tersebut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator dini pada Desember 2020 yang terus menunjukkan perbaikan ekonomi. *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur dan jasa di AS, Tiongkok, dan India melanjutkan fase

ekspansi. Selain itu, keyakinan konsumen terutama di Tiongkok dan kawasan Eropa juga terus membaik, dan keyakinan bisnis di banyak negara mengindikasikan adanya kelanjutan peningkatan.

Perbaikan ekonomi global tersebut mendorong berlanjutnya kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global diperkirakan mulai menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan perekonomian global, termasuk arah kebijakan fiskal AS yang baru, di tengah kondisi likuiditas global yang besar dan suku bunga yang tetap rendah. Perkembangan ini mendorong aliran modal ke negara berkembang dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Perkembangan pandemi Covid-19 global menunjukkan jumlah kasus yang meningkat walaupun tingkat fatalitasnya melandai. Sampai dengan 17 Januari 2021, jumlah kasus Covid-19 global telah mencapai lebih dari 95 juta jiwa dan tingkat kematian mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Perkembangan ini didorong oleh tambahan kasus harian global yang meningkat sejalan kasus gelombang ketiga (*third wave*) di AS dan Jepang, serta ditemukannya *strain* baru di UK. Walaupun demikian, perkembangan tingkat fatalitas (*fatality rate*) di seluruh kawasan tercatat melandai.

Grafik 4. Perkembangan Kasus Covid-19 Global

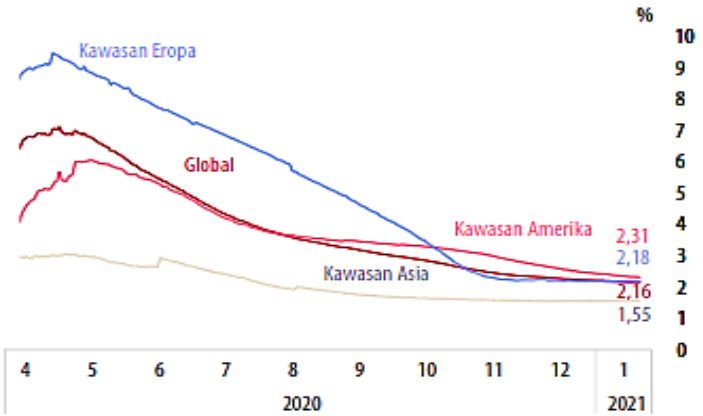

Sumber: WHO, 17 Januari 2021

Respons kebijakan yang terintegrasi, terutama moneter dan fiskal, dilakukan oleh negara-negara untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 yang bersifat multidimensi tersebut tidak hanya dapat diatasi dengan bertumpu pada satu kebijakan, namun membutuhkan respons kebijakan yang terintegrasi, baik untuk mengatasi masalah kesehatan, kemanusiaan, maupun pelemahan ekonomi. Stimulus fiskal dilakukan dengan segera untuk mengatasi permasalahan tersebut, termasuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat serta

menjamin berlanjutnya sisi produksi di tengah tantangan menurunnya penerimaan Pemerintah.

Melemahnya kinerja perekonomian telah membawa ekses terjadinya peningkatan defisit fiskal. Sepanjang 2020, stimulus fiskal telah dikucurkan berbagai negara yang secara total mencapai kisaran 11,7 triliun dolar AS atau mendekati 12% PDB dunia, dengan besaran respons negara maju lebih besar dibandingkan negara berkembang. Seiring terjaganya tingkat inflasi akibat rendahnya permintaan dan kebijakan moneter yang ekspansif baik melalui penurunan suku bunga maupun melalui penambahan likuiditas, banyak negara juga melakukan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi tekanan pada pasar keuangan, menjaga ketahanan dan kecukupan likuiditas, serta mendukung penyaluran kredit. Mereka melakukan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, baik dalam bentuk koordinasi waktu, jenis dan besaran stimulus, maupun pembiayaan fiskal oleh bank sentral.

Grafik 5. Kenaikan Defisit Fiskal di Negara Maju dan Berkembang Tahun 2020

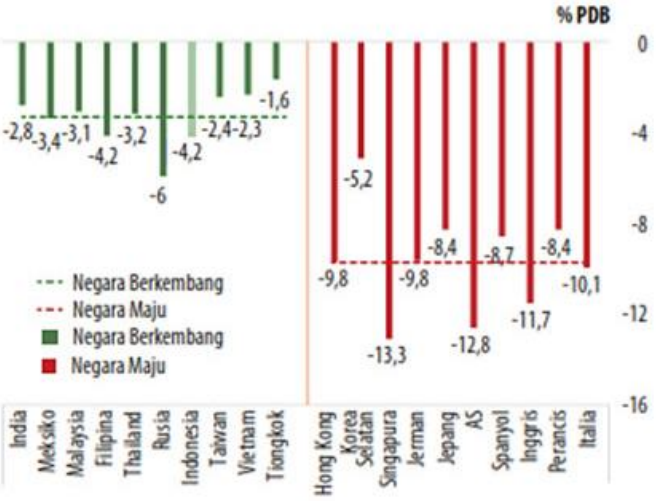

Sumber: Bloomberg, BI dan Kemenkeu 2021, diolah

Grafik 6. *Quantitative Easing* (Pelonggaran Likuiditas Tidak Konvensional) Negara Berkembang 2020

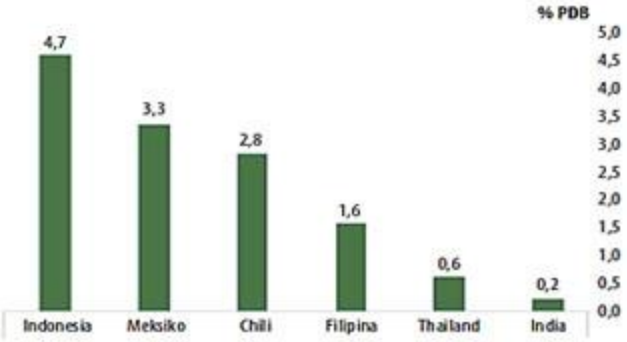

Sumber : Beberapa Bank Sentral Negara Berkembang 2021, diolah

2.2.2. Perbaikan Ekonomi Global Triwulan IV 2020

Volume perdagangan dunia meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian global. Pada 2020 volume perdagangan dunia lebih baik dari perkiraan sebelumnya, sejalan dengan *update* realisasi Triwulan III yang lebih baik dari rilis sebelumnya.

Grafik 7. Volume Perdagangan Dunia

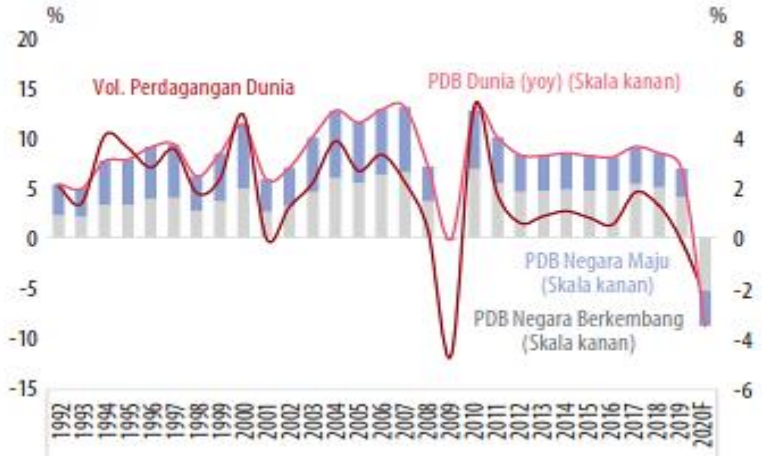

Sumber: IMF, BI, 2021, diolah

Indikasi peningkatan volume perdagangan tercermin pada kenaikan biaya pengapalan (*Baltic Dry Index*), sejalan dengan peningkatan kegiatan ekspor berbagai negara.

Grafik 8. *Dry Baltic Index*

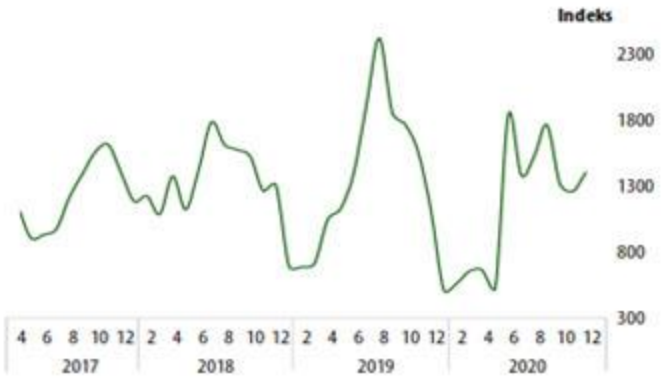

Sumber: Bloomberg 2020, diolah

Mencermati perkembangan tersebut, perbaikan pertumbuhan volume perdagangan dunia diperkirakan akan berlanjut pada 2021, sejalan dengan pemulihan ekonomi global. Seiring perbaikan volume perdagangan ini, harga komoditas pun akan meningkat akibat didorong oleh ekspektasi pemulihan ekonomi global. Peningkatan harga komoditas ekspor Indonesia diperkirakan didorong oleh kenaikan permintaan komoditas seiring ekspansi ekonomi

Tiongkok, perbaikan investasi dan manufaktur global, serta perkembangan positif program vaksinasi yang memicu perilaku *risk on*.

Harga komoditas ekspor Indonesia diperkirakan tetap tumbuh positif sepanjang 2021, yang didukung oleh ekspansi ekonomi dan tren peningkatan permintaan di pasar aset. Sementara itu harga minyak berada dalam tren meningkat, sebagai respons atas optimisme pemulihan ekonomi global dan sentimen positif di pasar aset di tengah prakiraan suplai yang lebih rendah akibat keputusan OPEC+ untuk menahan besaran peningkatan produksi. Ke depan, harga minyak diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan ekspansi perekonomian global.

Tabel 2. Harga Komoditas

Komoditas	2018	2019	2020				
			Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	2020
Tembaga	6,7	-7,8	-7,8	-12,3	11,8	21,6	3,3
Batu Bara	2,5	-8,6	-8,0	-28,2	-27,9	-9,8	-18,5
CPO	-19,2	-2,3	33,3	14,0	35,5	34,9	29,4
Karet	-16,8	12,4	-18,6	-22,7	3,8	36,4	-0,3
Nikel	27,8	7,0	3,8	0,0	-8,1	3,9	-0,1
Timah	0,5	-7,5	-17,2	-20,4	3,1	12,6	-5,5
Aluminium	7,4	-14,1	-5,8	-15,9	-2,6	9,8	-3,7
Kopi	-15,4	-11,8	14,8	-2,8	2,9	-3,4	3,0
Lainnya	1,2	-0,7	-2,1	-5,6	-4,9	-4,5	-4,3
Indeks Harga Komoditas Ekspor Indonesia	**-2,8**	**-3,0**	**1,5**	**-10,4**	**-1,7**	**7,5**	**-0,8**
Minyak (Brent)*	**71**	**64**	**51**	**31**	**43**	**45**	**42**

Sumber: Bloomberg 2020, diolah

2.3 Isu Krusial Ekonomi Dunia di Tahun 2021

2.3.1. Kebijakan Moneter Akomodatif Menopang Pemulihan Ekonomi Global di 2021

Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 akan terjadi jika diterapkan kebijakan moneter yang akomodatif. *The Fed* misalnya, melanjutkan *stance* kebijakan ekstra akomodatif melalui tingkat suku bunga yang tetap rendah bahkan hingga setelah 2021 untuk menjaga lintasan pemulihan ekonomi. Sejalan dengan itu terdapat potensi pembelian aset pada *current pace*, sebesar 80 miliar dolar AS pada *the United States Treasury* (UST) dan 40 miliar dolar AS pada *Mortgage-backed Securities* (MBS) per bulan, dengan perluasan *horizon tenor* yang lebih panjang. Kebijakan moneter akomodatif *the Fed* yang tetap berlanjut tersebut mampu memperbaiki tekanan pada pasar keuangan. *European Central Bank* (ECB) juga mengeluarkan kebijakan untuk menjaga tingkat suku bunga yang rendah, memperpanjang periode diskon suku bunga *Targeted Longer-term Refinancing Operations* (TLTRO)

hingga Juni 2022, serta meningkatkan alokasi *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP) hingga 1,85 triliun euro dan perpanjangan masa berlaku hingga Maret 2022. Rekalibrasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan kondisi pembiayaan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan ekspektasi inflasi.

Sementara itu, *Bank of Japan* (BoJ) memperpanjang program *funding* dan mengumumkan rencana melakukan asesmen kebijakan moneter pada 2021. BoJ memutuskan untuk mempertahankan kebijakan moneter yang meliputi *short-term interest rate target* sebesar -0,1% dan menjaga target *long-term rates* di sekitar nol, dengan komitmen pembelian *government bond* tanpa adanya *limitation*, mempertahankan program pembelian ekuitas ETFs (*Exchange Traded Funds*) dan J-REITs hingga 12 triliun yen (116 miliar dolar AS) dalam setahun, serta memperpanjang *emergency funding program* hingga 6 bulan dari target Maret 2021 menjadi berakhir pada September 2021.

2.3.2. Kebijakan Fiskal Ekspansif Terus Berlanjut untuk Mitigasi Risiko Dampak Covid-19 dan Mendorong Pemulihan Ekonomi

Di AS, Presiden Trump menandatangani stimulus baru *pandemic relief bill* sebesar 908 miliar dolar AS yang ditujukan untuk subsidi *unemployment benefit* dan *direct payment* kepada rumah tangga, distribusi vaksin, pembiayaan sekolah, bantuan kepada usaha kecil, dan pendanaan rumah sakit. Di Eropa, stimulus tambahan oleh negara Jerman, Perancis dan Italia terhadap sektor bisnis dilakukan untuk merespons *lockdown* pada akhir 2020 dan untuk mendukung pemulihan ekonomi menuju tingkat praCovid-19. Stimulus sebesar 1,8 triliun euro dialokasikan pada 2021-2027, dengan 1,074 triliun euro merupakan *Multiannual Financial Framework* (MFF) dan 750 miliar euro merupakan *Next Generation EU* (NGEU). Di Jepang, total stimulus sekitar 2,8 triliun dolar AS telah disetujui, termasuk stimulus tahap ke-3 sebesar 0,7 triliun dolar AS atau setara dengan 13% dari PDB Jepang. Stimulus tersebut difokuskan untuk memberikan kepastian pada pasar keuangan dan mereformasi ekonomi era pascapandemi, seperti transformasi digital, realisasi *green society*, reorganisasi Usaha Kecil Menengah, serta reorganisasi rantai pasokan. Di Tiongkok, realisasi belanja fiskal pada November 2020 masih berlanjut dan lebih tinggi dibandingkan tingkat saat pra-Covid-19, terutama pada sektor yang terkait dengan transportasi.

2.3.3. Pemulihan Ekonomi Dunia Berlanjut di 2021 sebagai Respon Implementasi Vaksinasi Covid-19 secara Global dan Berbagai Stimulus Kebijakan Fiskal dan Moneter di Banyak Negara

Ketersediaan vaksin mampu mendorong peningkatan mobilitas dan kegiatan ekonomi. Sejumlah negara telah memulai proses vaksinasi, antara lain Inggris (6,5% populasi), AS (3,6% populasi), Eropa (1,5% populasi), Tiongkok (0,7% penduduk), dan India (mulai pertengahan Januari 2021). Tercapainya *herd immunity* akan mendorong mobilitas ke level normal sebelum pandemi hingga nantinya dapat mendorong konsumsi, kegiatan produksi, dan perdagangan global, yang tentunya terimbas dari stimulus kebijakan untuk menjaga lintasan pemulihan. Perkembangan sejumlah indikator dini pada bulan Desember 2020 menunjukkan adanya perbaikan ekonomi, seperti kenaikan *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur dan jasa di AS, Tiongkok, dan India, dan keyakinan konsumen yang terus membaik, terutama di Tiongkok dan kawasan Eropa. Perkembangan tersebut akan memicu perbaikan ekonomi global yang terus berlanjut dengan pertumbuhan di kisaran 5,0 persen pada tahun 2021, setelah terkontraksi 3,8 persen pada tahun 2020.

Grafik 9. Indeks Keyakinan Konsumen 2020

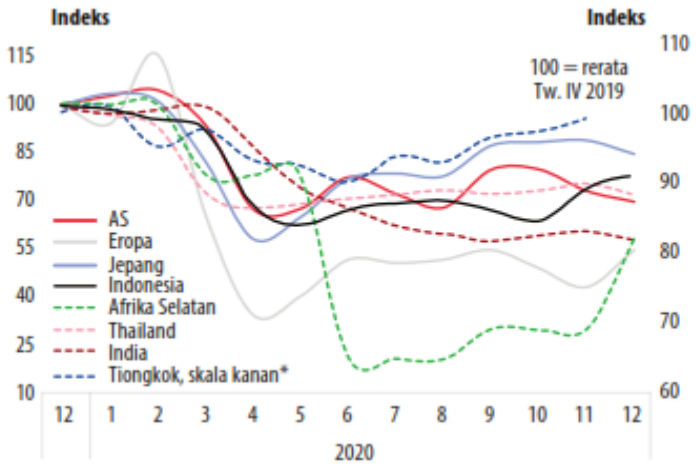

Sumber : Bloomberg, data Tiongkok s.d November 2020

2.3.4. Sinergitas Negara Maju dan Berkembang dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Global

Perbaikan ekonomi AS berlanjut di tengah kasus gelombang ketiga Covid-19. Perbaikan konsumsi sejalan dengan dampak positif stimulus akan mendorong prospek perekonomian dan investasi. Sementara itu, perbaikan sektor tenaga kerja berlanjut dengan penurunan pengangguran paruh waktu. Sementara itu pelaksanaan vaksinasi menopang pemulihan ekonomi Eropa

yang nantinya mendorong mobilitas dan kegiatan ekonomi ke depan. Prospek produksi, baik manufaktur maupun jasa, akan membaik sejalan dengan kebijakan ekstra akomodatif.

Di lain hal, risiko terkait ketegangan geopolitik akan menurun seiring dengan tercapainya kesepakatan *Brexit* EU-Inggris. Kesepakatan tersebut menyebabkan risiko '*no deal*' berhasil dihindari, sehingga negosiasi perdagangan internasional ke depan berbasis pada *Free Trade Agreement* (FTA). Sementara itu prospek ekonomi Tiongkok didukung berbagai kebijakan untuk penguatan kapasitas domestik, terutama investasi dan implementasi *dual circulation strategy*.

2.3.5. Aliran Modal Asing Masuk Signifikan ke Negara Berkembang

Ekspektasi pemulihan perekonomian global, utamanya akibat implementasi vaksinasi Covid-19, di tengah kondisi likuiditas global yang besar dan suku bunga yang tetap rendah akan menurunkan ketidakpastian pasar keuangan global. Prospek pemulihan ekonomi global yang didorong oleh keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter, pengendalian penyebaran Covid-19, serta implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara akan menurunkan ketidakpastian dan mendorong kembali aliran modal ke negara berkembang. Hal ini akan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Penurunan ketidakpastian pasar keuangan global tercermin pada perkembangan indeks EPU dan VIX yang menurun, demikian pula indikator risiko di negara berkembang yang menurun. Perkembangan positif ini terlihat pada penurunan indikator *Emerging Markets Bond Index* (EMBI) dan *Credit Default Swap* (CDS) banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Penurunan ketidakpastian tersebut kembali mendorong masuknya aliran modal pada negara berkembang, terutama negara *Emerging Asia* yang menjadi tujuan utama aliran modal masuk sebagai menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

BAB III
PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA

3.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dinamika perekonomian Indonesia 2020 sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19, yang tidak saja berdampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap aspek kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Awal Maret 2020, Indonesia memasuki siklus kasus positif Covid-19, yang dalam waktu singkat menyebar cepat ke berbagai wilayah Indonesia. Data menunjukkan penyebaran Covid-19 terus meningkat hingga akhir tahun, dengan catatan tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada Desember 2020, jumlah kasus positif Covid-19 secara nasional mencapai 743.198 jiwa dengan jumlah kematian tercatat 22.138 jiwa. Namun demikian tingkat kematian (*fatality rate*) menunjukkan angka yang terus menurun menjadi 3,0 persen dari level tertingginya pada 9 April 2020 sebesar 9,5 persen.

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 tidak dapat dielakkan telah memberikan tekanan yang luar biasa terhadap perekonomian nasional. Pada tahap awal, Covid-19 memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dunia yang mengakibatkan turunnya aliran masuk modal asing ke Indonesia dan terdepresiasinya rupiah. Tekanan berlanjut hingga terjadi penurunan kegiatan ekonomi sebagai dampak menurunnya ekspor dan perekonomian dunia. Kebijakan PSBB dan protokol kesehatan yang membatasi mobilitas manusia, barang, dan jasa sebagai pilihan kebijakan yang paling rasional untuk mencegah dampak pandemi, pun memberikan tekanan terhadap perekonomian. Akibatnya kegiatan ekonomi di berbagai sektor menurun tajam, yang bila tidak ditangani dan direspons dengan segera akan membawa ekses turunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan meluasnya kemiskinan. Kondisi demikian patut menjadi perhatian karena berpotensi mengancam stabilitas perekonomian, termasuk stabilitas sistem keuangan.

Tabel di bawah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 yang terdepresiasi sangat dalam akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi hanya mencapai -2,07 persen, terdepresiasi sebesar 7,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 10. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 2014-2020

Sumber : BPS, 2021

Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV 2020 menunjukkan proses perbaikan yang berlanjut. Ekonomi pada triwulan tersebut terkontraksi sebesar -2,19 persen (YoY), membaik dari kontraksi Triwulan III 2020 sebesar -3,49 persen (QoQ). Konsumsi Pemerintah tumbuh positif di 2020 sebesar 1,94 persen, yang dipengaruhi oleh realisasi stimulus Pemerintah terutama berupa bantuan sosial, belanja barang dan jasa lainnya, serta TKDD. Kontraksi konsumsi rumah tangga juga membaik menjadi -3,61 persen (YoY) dari -4,05 persen (QoQ) pada triwulan sebelumnya atau -2.63 persen (yoy) untuk tahun 2020, seiring dengan perbaikan mobilitas masyarakat. Pertumbuhan investasi juga membaik menjadi -6,15 persen (YoY) atau -4,95 persen (YoY) untuk 2020.

Sementara itu net ekspor tercatat positif, ditopang perbaikan kinerja ekspor sejalan dengan perbaikan kinerja perekonomian di beberapa negara tujuan ekspor, di tengah kinerja impor yang masih terbatas. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Pertumbuhan ekonomi sisi Pengeluaran

Komponen	2018				2018	2019				2019	2020				2020
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
Konsumsi Rumah Tangga	4,96	5,17	5,00	5,08	**5,05**	5,02	5,18	5,01	4,97	**5,04**	2,83	-5,52	-4,04	-3,61	-2,63
Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga	8,12	8,77	8,61	10,82	**9,10**	16,96	15,29	7,41	3,53	**10,62**	-5,09	-7,75	-2,12	-2,14	-4,29
Konsumsi Pemerintah	2,71	5,21	6,26	4,56	**4,80**	5,22	8,23	0,98	0,48	**3,25**	3,75	-6,90	9,76	1,76	1,94
Investasi (PMTDB)	7,92	5,81	6,92	6,01	**6,64**	5,03	4,55	4,21	4,06	**4,45**	1,70	-8,61	-6,48	-6,15	-4,95
Investasi Bangunan	6,12	4,96	5,60	5,02	**5,41**	5,48	5,46	5,03	5,53	**5,37**	2,76	-5,26	-5,60	-6,63	-3,78
Investasi Nonbangunan	13,56	8,33	10,73	8,96	**10,31**	3,69	1,96	1,95	-0,13	**1,80**	-1,46	-18,62	-8,99	-4,71	-8,38
Ekspor	5,84	7,48	8,34	4,59	**6,55**	-1,58	-1,73	0,10	-0,39	**-0,87**	0,23	-11,66	-10,82	-7,21	-7,70
Impor	12,46	14,94	13,77	7,11	**11,88**	-7,47	-6,84	-8,30	-8,05	**-7,69**	-2,19	-16,96	-21,86	-13,52	-14,71
PDB	**5,06**	**5,27**	**5,17**	**5,18**	**5,17**	**5,07**	**5,05**	**5,02**	**4,97**	**5,02**	**2,97**	**-5,32**	**-3,49**	**-2,19**	**-2,07**

Sumber: Bank Indonesia

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75 persen; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,36 persen; Pulau Kalimantan sebesar 7,94 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,66

persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94 persen; serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35 persen.

Dampak pandemi Covid-19 dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antarpulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan (c-to-c) meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01 persen; Pulau Jawa sebesar 2,51 persen; Pulau Kalimantan sebesar 2,27 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 1,19 persen. Sebaliknya, dampak Covid-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan, meliputi Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 0,23 persen serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44 persen.

Gambar 2. Pertumbuhan & Kontribusi PDRB Menurut Pulau Tahun 2020

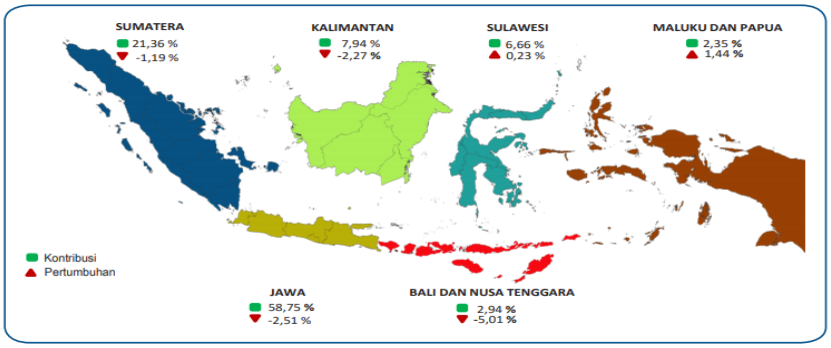

Sumber: BPS

3.2 Kondisi Inflasi Tahun 2020

Capaian inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2020 tercatat sebesar 1,68 persen (YoY) atau menurun dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 2,72 persen (YoY, SBH 2012), sebagaimana disajikan Grafik 3.2. Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga.

Rendahnya realisasi inflasi di tahun 2020 didukung pula oleh capaian seluruh kelompok inflasi yang terkendali. Inflasi kelompok inti terpantau menurun pada tingkat yang rendah, sebesar 1,60 persen (YoY) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,02 persen (YoY, SBH 2012). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik, sebagaimana tercermin pada kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Rendahnya inflasi inti juga didukung oleh tekanan harga komoditas global yang relatif minimal, dan terbatasnya dampak lanjutan dari inflasi kelompok Volatile Food (VF) serta Administered Prices (AP). Selain itu, konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia berhasil menjangkar ekspektasi inflasi sesuai sasaran dan menjaga nilai tukar Rupiah sesuai nilai fundamentalnya.

Grafik 11. Data Inflasi 2017-2020

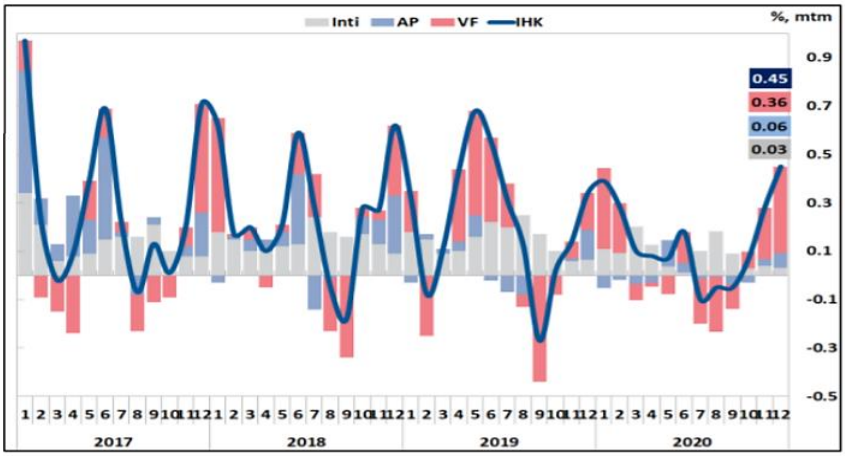

Sumber: Bank Indonesia

Gambar 3. Inflasi Menurut Pulau Tahun 2020

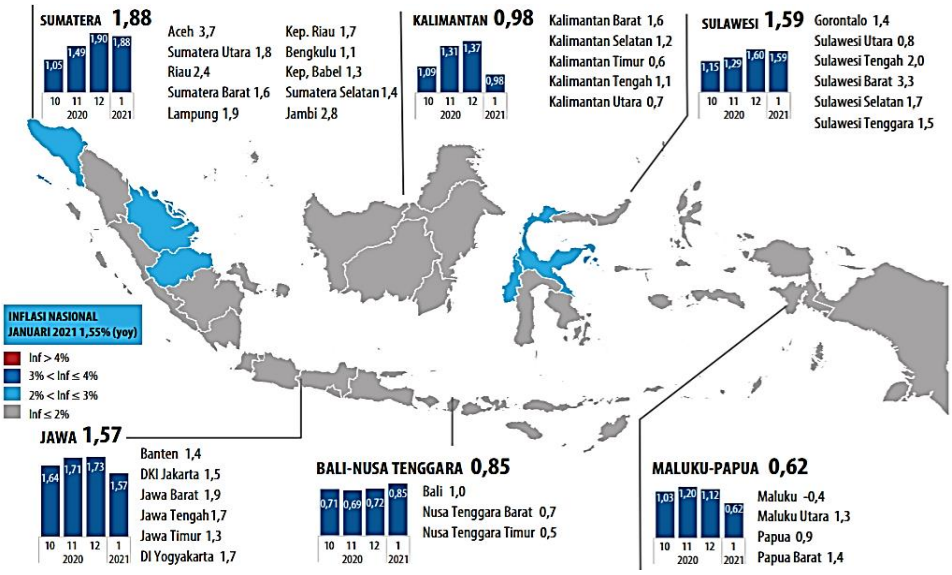

Sumber: Bank Indonesia

3.3 Nilai Tukar Rupiah Stabil

Pada tahun 2020, di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan baik karena faktor global maupun sejumlah risiko domestik, secara rata-rata nilai tukar rupiah mencapai Rp14.657,- per USD, cenderung menguat terhadap rata-rata nilai tukar rupiah Triwulan II tahun 2020. Dari sisi eksternal, pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi ketidakpastian di pasar keuangan global akibat meningkatnya kembali kasus baru Covid-19 di Kawasan Eropa dan AS, isu geopolitik yang meliputi ketegangan hubungan dagang AS dan Tiongkok, isu BREXIT dan spekulasi terhadap pemilu AS. Meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut sempat menahan aliran modal asing yang masuk dan menekan nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Grafik 12. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

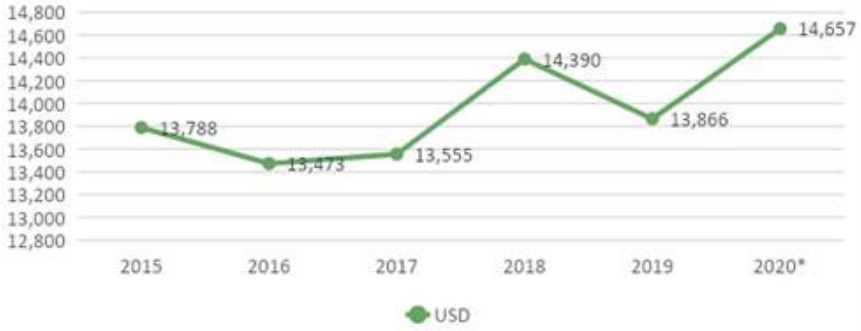

Sumber: Bank Indonesia

3.4 Harga Minyak Indonesia Mengalami Penurunan

Meluasnya penyebaran Covid-19 ke berbagai negara telah mengakibatkan kekhawatiran atas menurunnya kondisi ekonomi global dan permintaan minyak mentah. Tidak hanya itu, *travel restriction* di mayoritas negara memicu penurunan drastis permintaan minyak mentah secara global. Tentunya kondisi ini menyebabkan harga mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*/ICP) terus tertekan. Pada tahun 2020 ICP turun menjadi US$52,77 per barel, turun US$4,28 per barel dari tahun sebelumnya.

Penurunan harga rata-rata ICP tahun 2020 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penetapan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO serta penyebarannya yang semakin meluas sehingga mendorong pemberlakuan *lockdown* di sebagian besar negara konsumen minyak mentah. Penyebab lainnya adalah keputusan Arab Saudi menurunkan harga jual minyak mentah mereka untuk merebut pangsa pasar. Tidak hanya itu, Arab Saudi juga berencana untuk meningkatkan produksi setelah Rusia menolak bergabung dalam rencana tambahan pemotongan produksi OPEC+. Hal ini meningkatkan kekhawatiran pelaku pasar atas kondisi yang telah *over supply*. Penurunan harga juga disebabkan laporan OPEC terkait penurunan pertumbuhan ekonomi dunia, yang ditandai penurunan proyeksi pertumbuhan GDP dunia tahun 2020 sebagai dampak dari serangan Covid-19.

Grafik 13. Rata-Rata Harga Minyak Mentah Dunia

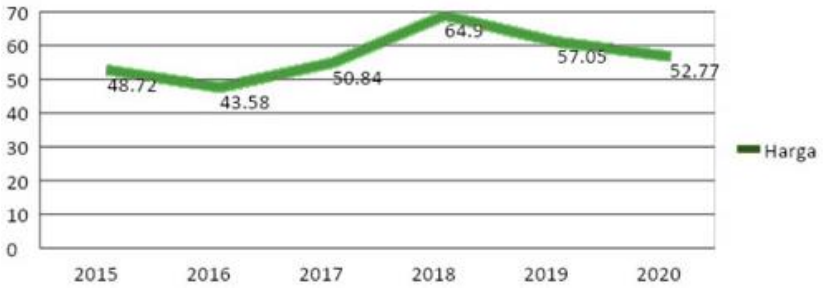

Sumber: *Macrotrends*

3.5 Target *Lifting* Minyak Tak Terpenuhi

Lifting minyak dalam APBN 2020 ditargetkan sebesar 755 ribu per barel, sedangkan untuk *lifting* gas ditargetkan sebesar 1.191 ribu bopd. Namun pandemi Covid-19 menyebabkan hampir seluruh daerah di Indonesia melakukan pembatasan mobilitas yang berdampak pada operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) minyak dan gas bumi (Migas). Pemerintah memperkirakan akan adanya kesulitan bagi KKKS untuk mencapai target produksi di masa pandemi sehingga Pemerintah menurunkan target *lifting* minyak yaitu hanya sebesar 735 ribu barel per hari dan gas sebesar 1.064 ribu bopd pada Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2020 yang mengatur tentang rincian APBN.

Walaupun Pemerintah telah menurunkan target namun produksi minyak dan gas masih meleset dari target. Tahun 2020 diperkirakan realisasi *lifting* minyak hanya sebesar 725 ribu per barel. Sedangkan untuk *lifting* gas diperkirakan sebesar 1.050 ribu bopd pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena rendahnya investasi sektor hulu migas sebagai imbas dari rendahnya harga minyak dan LNG di tengah pandemi Covid-19.

Grafik 14. Data Lifting Minyak Dan Gas 2015-2020 (dalam ribu barrel/hari) *(outlook)

Sumber: SKK Migas

3.6 Angka Kemiskinan dan Pengangguran Berkorelasi Naik

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 mencapai 27,55 juta orang. Dibandingkan Maret tahun 2020, jumlah penduduk miskin meningkat 1,13 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 2,76 juta orang. Persentase penduduk miskin pada September 2020 tercatat sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret – September 2020 jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 876,5 ribu orang, sedangkan di pedesaan naik sebesar 249,1 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 7,38 persen menjadi 7,88 persen, sementara di pedesaan naik dari 12,82 persen menjadi 13,20 persen.

Grafik 15. Laju Kemiskinan Nasional 2015-2020

Sumber: SKK Migas

Tabel 4 menunjukkan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut pulau pada Maret 2020. Terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 20,34 persen. Sementara itu persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,81 persen. Dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa (14,05 juta orang), sedangkan jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan (0,97 juta orang).

Tabel 4. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Pulau (Maret 2020)

Pulau	Presentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
Sumatera	8,39	11,01	9,87	2154,41	3686,06	5837,47
Jawa	7,48	12,64	9,24	7493,53	6559,28	14052,81
Bali-Nusa Tenggara	8,56	17,69	13,55	582,2	1450,63	2032,83
Kalimantan	4,35	7,13	5,81	345,36	624,28	969,64
Sulawesi	5,63	13,12	10,1	452,28	1554,5	2006,78
Maluku dan Papua	5,25	28,15	20,34	134,18	1390,31	1524,49
Indonesia	**7,38**	**12,82**	**9,78**	**11161,96**	**15262,06**	**26424,02**

Sumber: BPS

Dapat dilihat pada Grafik 16 di bawah bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan jumlah penduduk yang menganggur semakin meningkat. Dari data BPS per Agustus 2020 diperkirakan penduduk yang menganggur mencapai angka 9,77 juta, naik 3 juta orang dibanding bulan Februari sebelum adanya Covid-19. Dari penduduk usia kerja, terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) yang terdampak Covid-19, terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,77

juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (24,03 juta orang).

Grafik 16. Jumlah Pengangguran Nasional (dalam Juta Penduduk)

Sumber: BPS

3.7 Laju IPM Melambat

Pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 dibanding tahun-tahun sebelumnya. IPM Indonesia tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03 persen (meningkat 0,02 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Seiring dengan melambatnya IPM nasional, pada tahun 2020 terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan IPM. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Provinsi yang mengalami penurunan IPM terbesar adalah Kalimantan Utara dan Papua, sebaliknya Papua Barat mengalami peningkatan IPM yang tertinggi. Pada tahun 2019, IPM Papua Barat mencapai 64,70 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 65,09. Dari sisi perbandingan antarprovinsi, tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam kategori capaian dan peringkat di masing-masing provinsi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Provinsi Papua (60,44), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh DKI Jakarta (80,77) yang sekaligus menjadikan DKI Jakarta sebagai satu-satunya provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” (IPM ≥ 80). Jumlah provinsi dengan status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” (70 ≤ IPM < 80) pada tahun 2020 adalah sebanyak 22 dan dengan status “sedang” (capaian 60 ≤ IPM < 70) adalah sebanyak 11.

Grafik 17. Data Indeks Pembangunan Indonesia Per Provinsi

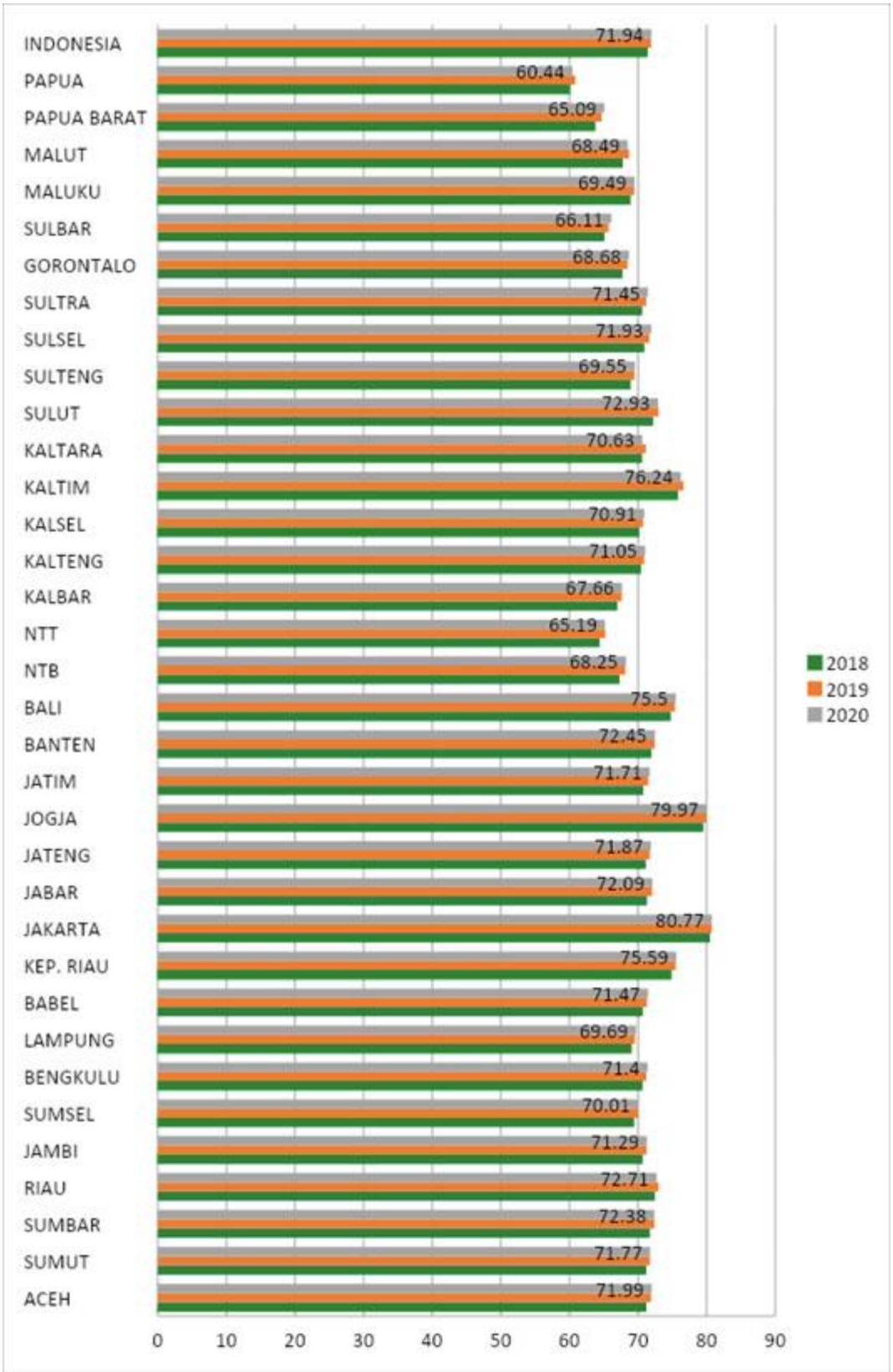

Sumber: BPS

BAB IV
USULAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2022

4.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

Berdasarkan data dari Bappenas, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang sedang disusun adalah "**Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**". Membicarakan pemulihan ekonomi dan melakukan reformasi struktural, utamanya pascapandemi Covid-19, tentunya memerlukan upaya-upaya agar rencana kerja yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan. Diperlukan koordinasi, sinergi, integrasi, dan kesinambungan antarpemangku kepentingan baik di daerah maupun pusat melalui optimalisasi forum-forum rapat koordinasi dan musyawarah pembangunan dalam menentukan kegiatan-kegiatan prioritas.

RKP 2022 ini merupakan RKP tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024, dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga, penyusunan RKPD-RKPD, dan menjadi masukan penting bagi BUMN dalam menyusun rencana kerja dan anggarannya. Rangkaian tahapan penyusunan RKP 2022 telah dimulai sejak Oktober 2020 melalui penyelenggaraan forum konsultasi publik, evaluasi pelaksanaan RKP 2020, serta penentuan tema, arah, sasaran, dan prioritas pembangunan.

Evaluasi RKP 2020 menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional nomor 3 yaitu nilai tambah sektor riil, industri, investasi dan kesempatan kerja, dinilai relatif paling tertinggal bila dibandingkan dengan capaian Prioritas Nasional lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator seperti turunnya pertumbuhan PDB untuk industri, pertumbuhan ekspor barang dan jasa, pertumbuhan investasi, serta terjadi peningkatan pada pengangguran terbuka. Mengingat pembangunan tahun 2020 mengalami tantangan yang sangat berat karena pandemi Covid-19, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hebat. Di samping pertumbuhan ekonomi sepanjang 2020 juga terkontraksi -2,07 persen, angka kemiskinan Indonesia sesuai rilis BPS naik menjadi menjadi 10,19 persen (27,5 juta orang).

Bab ini menjelaskan hasil analisis beberapa isu strategis dominan yang muncul pada setiap masa kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (reses) selama kurun waktu tahun sidang 2020-2021. Isu-isu tersebut layak dipertimbangkan sebagai masukan dalam merumuskan program-program ataupun Prioritas Nasional, sebagai usulan DPD RI kepada Pemerintah, sehingga diharapkan RKP tahun 2022 lebih komprehensif dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat dan daerah.

4.2 Usulan Program Prioritas Daerah Tahun 2022 Berdasarkan Aspirasi Masyarakat dan Daerah

Sebagai lembaga legislatif yang merupakan bagian dari sistem *check and balance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kebutuhan DPD RI akan data Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya adalah sebuah *mandatory* undang-undang yang tidak bisa ditangguhkan. Berdasarkan hal tersebut sekaligus untuk memenuhi kebutuhan DPD RI atas data RKP – sebagai bahan untuk memberikan pertimbangan atas RUU APBN yang akan disusun nantinya – , maka Pusat Kajian Daerah dan Anggaran (Puskadaran) yang diinisiasi oleh Bidang Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (Piapusda) melakukan kajian berupa usulan program-program prioritas terhadap rancangan RKP tahun 2022 berdasarkan aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima pada Tahun Sidang 2020-2021. Hasil kajian ini diharapkan menjadi masukan yang layak dipertimbangkan, utamanya bagi Komite IV dalam rangka menyampaikan usulan program Prioritas Nasional dalam RKP 2022 kepada mitra kerjanya khususnya Bappenas.

Pada periode Tahun Sidang 2020-2021, khususnya September 2020 sampai dengan Maret 2021 terdapat 2.727 aspirasi yang berhasil diserap oleh Anggota DPD RI pada masa kegiatan di daerah di 34 (tiga puluh empat provinsi). Aspirasi-aspirasi tersebut dapat dibedakan sesuai bidang tugas alat kelengkapan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Data Aspirasi Masyarakat dan Daerah Periode September 2020 -Maret 2021

No.	Alat Kelengkapan	Jumlah Asmasda
1.	Komite I	787
2.	Komite II	640
3.	Komite III	817
4.	Komite IV	467
5.	BULD	16
Total		2.727

Sumber : publikasmada.dpd.go.id

Metode yang digunakan untuk menentukan isu prioritas atas aspirasi yang diserap adalah APKL (Aktual, Problematika, Kekhalayakan, dan Layak), dimana:

a. Aktual adalah aspirasi yang sering terjadi atau dalam proses kejadian sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat;

b. Problematik adalah aspirasi yang memiliki dimensi permasalahan yang kompleks sehingga mendesak ditemukan solusinya;

c. Kekhalayakan adalah aspirasi yang secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak;

d. Layak adalah aspirasi yang masuk akal, realistis, serta relevan untuk diangkat sebagai isu dan mendesak ditemukan pemecahan masalahnya.

Berdasarkan hasil analisis melalui metode tersebut, ditemukan terdapat 6 (enam) isu prioritas yang selanjutnya dirumuskan usulan-usulan program kebijakan pembangunan daerah dalam RKP Tahun 2022. Adapun isu prioritas dimaksud yaitu:

1. Peningkatan Akselerasi Pemulihan Kesehatan Masyarakat;
2. Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);
3. Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
4. Pembangunan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Mitigasi Bencana;
5. Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
6. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional.

4.3 Peningkatan Akselerasi Pemulihan Kesehatan Masyarakat

Upaya yang tepat untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan kesehatan masyarakat menjadi syarat mutlak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Jika penyebaran virus Covid-19 dapat ditekan sesuai harapan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat memenuhi target, yaitu minus 1 persen sampai minus 0,1 persen pada kuartal pertama 2021, dan akan kembali ke angka positif pada kuartal pertama 2022.

Berdasarkan data Satgas Covid-19 per 6 April 2021, jumlah kasus aktif positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 158.378 kasus dengan total akumulasi kasus positif adalah 1.534.255, sembuh 1.375.877, dan meninggal 41.669. Mengingat pandemi Covid-19 ini tidak akan berhenti dalam waktu singkat, maka Pemerintah harus terus memastikan perekonomian berjalan, dan perlu mengambil jalan tengah untuk menyeimbangkan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Strategi Pemerintah juga perlu difokuskan untuk memastikan kelompok masyarakat rentan ekonomi, yang memang harus bekerja setiap hari untuk dapat melanjutkan hidup, dapat tetap berjalan dengan meminimalisir risiko penularan.

Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat pemulihan kesehatan nasional, pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 bagi seluruh masyarakat perlu ditingkatkan, baik dari segi volume maupun waktu. Hal itu sangat penting agar *herd immunity* atau kekebalan komunal dapat segera terbentuk di Indonesia. Percepatan vaksinasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan data kasus serta daerah yang

masuk dalam zona padat, daerah densitas tinggi, mobilitas tinggi, interaksi yang tinggi, serta daerah sentra perekonomian.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan permasalahan aktual di daerah yang berhasil diserap selama Tahun Sidang 2020-2021, terangkum beberapa usulan program sebagai berikut:

Tabel 6. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
Peningkatan Akselerasi Pemulihan Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan SDM Tenaga Kesehatan	SDM tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan atau penanganan pasien Covid-19 jumlahnya sangat terbatas di beberapa daerah, sementara itu pelayanan umum kesehatan lainnya harus tetap dilakukan kepada masyarakat.	Papua Bengkulu NTT Jawa Timur Jawa Tengah Aceh
		Kebutuhan tenaga medis di tengah wabah Covid-19 sangat tinggi, utamanya dokter gigi, dokter umum, dan tenaga rekam medis di daerah-daerah kepulauan.	Maluku Utara NTT NTB Kepulauan Riau
		Perlu pemerataan tenaga kesehatan (medis), terutama dokter di desa, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah kepulauan.	Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Maluku Utara Bengkulu NTT
	2. Penegakan Hukum Kesehatan	Tantangan dan kendala yang dihadapi Gugus Tugas Covid-19 di daerah antara lain masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga menyebabkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penularan wabah belum maksimal.	Kalimantan Selatan Jawa Barat Banten Sulawesi Tengah NTB
		Meminta Pemerintah pusat memberikan jaminan kepastian hukum atau perlindungan hukum bagi perawat dalam hal status kepegawaian dan perlindungan dalam tugas berupa penghargaan dalam tunjangan profesi berdasarkan beban kerja, dan risiko kerja.	Kalimantan Timur Jawa Timur Maluku Utara Papua Papua Barat
		Perlu adanya kebijakan pemberian insentif/imbal jasa pelayanan keperawatan yang adil dan merata dalam sistem skema JKN dan BPJS.	Kalimantan Timur Jawa Timur Maluku Utara Papua Papua Barat
	3. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Perlu peningkatan perawatan sarana prasarana kesehatan di RS, serta perlu pengembangan/pembangunan rumah sakit dengan fasilitas mumpuni namun terjangkau, baik dari segi biaya maupun jarak tempuh.	Bengkulu Maluku Utara Papua Bengkulu NTT

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
		Perlu peningkatan pelayanan kesehatan khususnya perlindungan pasien.	Sulawesi Utara Maluku Jawa Barat Kalimantan Selatan Jawa Timur Jawa Tengah Aceh
		Perlu menurunkan biaya rapid/swab test & vaksin Covid-19, agar lebih mudah menjangkau masyarakat secara menyeluruh.	Kalimantan Timur D.I. Yogyakarta Lampung Sumatera Barat Jawa Barat Banten
		Mendorong masyarakat melakukan *social distancing* dan mengurangi aktivitas di tempat yang berisiko Covid-19 guna membantu percepatan penanganan Covid-19.	Banten Jawa Timur Lampung Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sumatera Barat Sulawesi Tengah
		Dinas Kesehatan dan satgas terkait di provinsi diharapkan tetap selalu berupaya membantu penanganan pandemi Covid-19 dengan melakukan penguatan kapasitas RS rujukan dan menambah anggaran untuk penanganan Covid-19.	Riau Sulawesi Barat Sulawesi Utara Jawa Timur Sumatera Barat Bangka Belitung Bengkulu Sulawesi Tenggara Lampung

4.4 Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamika di suatu negara yang telah meliputi segenap aspek dalam kehidupan nasional yang terintegrasi dan memiliki ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala permasalahan (Asmawi, 2009). Ketahanan nasional dari berbagai bidang sangat dibutuhkan oleh negara agar bisa maju dan berkembang, salah satunya adalah dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kemandirian ekonomi nasional agar tercapai tingkat ketahanan ekonomi yang baik.

Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan

kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, tantangan, gangguan, serta hambatan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Bantacut, 2013; Marlinah, 2017). Salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan ekonomi adalah dengan menggerakan roda ekonomi melalui pengembangan ekonomi lokal (PEL).

Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan daerah pertanian/perkebunan, Pemerintah perlu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui PEL. PEL merupakan proses dimana Pemerintah lokal dan organisasi masyarakat bersinergi untuk mendorong, merangsang, dan memelihara aktivitas usaha guna menciptakan lapangan pekerjaan.

Selain itu, PEL dapat dikatakan sebagai suatu proses peningkatan kemampuan ekonomi lokal meliputi perumusan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM agar mampu menciptakan produk-produk yang lebih baik, serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Dalam masa perekonomian yang masih belum stabil seperti saat pandemi Covid-19 ini, PEL dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain melalui penguatan kewirausahaan dan UMKM, penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, dan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan permasalahan aktual di daerah yang berhasil diserap selama Tahun Sidang 2020-2021, terangkum beberapa usulan program sebagai berikut:

Tabel 7. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Ketahanan Ekonomi

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
Penguatan Ketahanan Nasional Melalui Penguatan Ekonomi Lokal	1. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM	Sulitnya masyarakat mengurus legalitas UMKM, dan belum adanya bantuan peralatan untuk meningkatkan produksi.	Jawa Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara DI Yogyakarta
		Perlu pendampingan dan pembinaan yang lebih intens pada kelembagaan UMKM.	Sulawesi Tenggara Lampung Bali Sumatera Barat Kalimantan Selatan Jawa Barat Riau D.I. Yogyakarta

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
		Perlu pengembangan daerah wisata desa melalui program pendampingan, akses modal dan pelatihan seperti Pokdarwis dan lainnya.	Lampung Sulawesi Tenggara Sumatera Utara Riau
		Perlu peningkatan peran koperasi usaha tani dan nelayan untuk menjamin dan menyuplai kebutuhan petani dan nelayan sesuai komoditi unggulan dan hasil tangkap ikan.	Banten Sulawesi Selatan Jawa Barat Riau Sulawesi Tenggara
		Perlu pembinaan UMKM agar mampu memanfaatkan teknologi *daring* yang berkembang saat ini	Kalimantan Timur D.I. Yogyakarta Lampung Sumatera Barat Jawa Barat Banten
	2. Penyaluran Bansos dan Subsidi Tepat Sasaran	Perlu perbaikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama pada upaya perlindungan sosial di masa pandemi di tahun 2021 yang lebih merata dan adil bagi masyarakat.	Bali Bengkulu Gorontalo Jawa Tengah Sumatera Utara Papua Riau
		Bantuan sosial dan subsidi harus dilakukan secara transparan, data penerima bansos dan jenis-jenis bansos yang diberikan kepada masyarakat seharusnya dapat tersosialisasikan dengan baik.	Papua Riau Kalimantan Timur Bengkulu NTT Jawa Timur Jawa Tengah
		Masih adanya keluhan masyarakat bahwa bantuan sosial dan subsidi dinilai tidak tepat sasaran.	Bali Bengkulu Gorontalo Jawa Tengah Sumatera Utara Papua Riau
		Perlu perbaikan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama upaya perlindungan sosial di masa pandemi di tahun 2021 yang lebih merata dan adil bagi masyarakat.	D.I. Yogyakarta Lampung Sumatera Barat Jawa Barat
	3. Penguatan BUMDes untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Pembentukan BUMDes hendaknya mengacu pada potensi yang dimiliki desa, untuk mempermudah pengembangannya.	D.I. Yogyakarta Banten
		Banyak BUMDes yang didirikan, namun dalam perjalanannya banyak yang gulung tikar atau terbengkalai hanya menyisakan papan nama, walaupun ada juga yang berhasil.	Sulawesi Barat Bengkulu Gorontalo Jawa Tengah

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
		Keterbatasan SDM di desa mengakibatkan BUMDes tidak dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penguatan dan pemerataan ekonomi warga pedesaan. Pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di pedesaan tidak mampu mendorong terjadinya peningkatan produktivitas sumber-sumber perekonomian pedesaan.	Sumatera Utara Papua Riau Kalimantan Timur Lampung
		Perlu memperjelas bentuk badan hukum: apakah BUMDes-nya yang dijadikan badan hukum atau unit usahanya.	Lampung Riau Sulawesi Barat Sulawesi Utara Jawa Timur Sumatera Barat Bangka Belitung
		Pemerintah desa perlu mengoptimalkan BUMDes sebagai pemasukan lain desa.	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Lampung
		Pemanfaatan aset-aset desa belum optimal terutama pemanfaatannya sebagai usaha prioritas oleh BUMDes yang dimiliki setiap desa.	Kalimantan Barat Sulawesi Tengah Sumatera Selatan NTB
		Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Aparatur Desa dan SDM pengelola BUMDes, dan kurangnya inovasi maupun pengetahuan pemasaran/akses pasar bagi produk-produk BUMDes.	Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Jambi Sumatera Barat

4.5 Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Salah satu dari tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Komitmen pemerataan pembangunan antarwilayah di antaranya tertuang dalam kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Strategi-strategi mumpuni pada 2020-2024 perlu dilakukan oleh Pemerintah untuk menurunkan jumlah daerah tertinggal dan memeratakan pembangunan antarwilayah.

Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 122 kabupaten yang termasuk dalam kategori daerah tertinggal (Indonesia.go.id, 2020). Sebagian besar daerah tertinggal tersebut berada di wilayah Timur Indonesia. Daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar pada dasarnya memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak penduduknya yang belum menikmati manfaat pembangunan akibat keterisolasian dan terbatasnya akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi. Strategi untuk mengembangkan

daerah-daerah ini perlu didasarkan pada potensi unggulan wilayah serta mempertimbangkan karakteristik sosio-kultural yang spesifik di wilayah tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah perbatasan, kepulauan terluar dan daerah tertinggal, antara lain: rendahnya akses ke pelayanan dasar; rendahnya kapasitas sumber daya manusia; terbatasnya akses ke lembaga keuangan, pasar, dan aktivitas ekonomi; rendahnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah ke pusat-pusat pertumbuhan; kurangnya pemahaman tentang manajemen aset dan sumber daya alam secara berkelanjutan; serta kurangnya perhatian pada karakteristik sosial dan budaya lokal (Kementerian PPN, 2016).

Terlepas dari berbagai upaya yang sudah lama dilakukan untuk membangun daerah-daerah tersebut, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara daerah maju dengan daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar. Untuk itu, Pemerintah harus mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dalam mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan permasalahan aktual di daerah yang berhasil diserap selama Tahun Sidang 2020-2021, terangkum beberapa usulan program sebagai berikut:

Tabel 8. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Pemerataan Kesejahteraan

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Perluasan Infrastruktur Dasar	Perlu peningkatan pembangunan rumah murah bagi warga miskin.	Kalimantan Selatan Jawa Barat Banten Sulawesi Tengah NTB
		Perlu peningkatan jenjang pendidikan tenaga pendidik secara merata.	Kalimantan Timur Jawa Timur Maluku Utara Papua Barat Papua Papua Barat
		Perlu pemerataan sarana prasarana dan fasilitas pendukung pendidikan, baik swasta maupun negeri.	Jambi Jawa Timur Lampung Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Utara Sumatera Barat Sulawesi Tengah

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
	2. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda	Perlu peningkatan konektivitas transportasi jalan.	Riau Sulawesi Barat Sulawesi Utara Jawa Timur Sumatera Barat Bangka Belitung Bengkulu Sulawesi Tenggara Lampung
		Perlu peningkatan konektivitas transportasi laut.	Papua Bengkulu Jambi Sumatera Barat Kepulauan Riau Sumatera Utara Sulawesi Utara Riau
		Perlu perbaikan sistem transportasi udara.	Papua Bengkulu Jambi Sumatera Barat Kepulauan Riau Sumatera Utara
	3. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan	Perlu peningkatan pembangunan infrastruktur pelabuhan khususnya kota-kota di daerah kepulauan.	Sulawesi Utara Maluku Maluku Utara NTT Papua Barat
		Perlu penambahan lampu-lampu penerangan jalan.	Jambi Sumatera Barat Bangka Belitung Kepulauan Riau Sumatera Utara Sulawesi Tengah NTT Sulawesi Utara Riau
	4. Akselerasi Transformasi Digital	Perlu peningkatan program Kostra Tani untuk meningkatkan kinerja petani, antara lain perlunya pendampingan penyuluh dan kebutuhan penggunaan teknologi informasi. Kendala terbesar yang dihadapi selama ini adalah masalah sarana-prasarana seperti listrik, jaringan internet yang belum merata, dan insentif pelatihan.	Bangka Belitung Kalimantan Timur Aceh Jambi Kalimantan Tengah Papua Barat Maluku Utara
		Perlu perluasan jaringan internet ke daerah-daerah yang belum terjangkau	Sumatera Utara Sulawesi Selatan Jawa Tengah Sulawesi Tengah Bengkulu DI Yogyakarta Kalimantan Timur

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
			Sulawesi Utara Gorontalo
		Tidak semua daerah mampu menyelenggarakan pendidikan daring. Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dan transfer teknologi informasi secara merata di seluruh wilayah demi mengurangi *digital divide*.	Sumatera Utara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Bengkulu Kalimantan Timur Sulawesi Utara Gorontalo
		Terdapat persoalan kesenjangan teknologi (*digital divide)* yang menyebabkan tidak meratanya akses untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.	Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Aceh Maluku Papua
		Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) Tahun Ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19 masih mengalami kendala seperti minimnya fasilitas jaringan internet dan kurangnya fasilitas gawai/gadget bagi guru dan siswa di berbagai daerah.	Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Tengah Aceh Maluku Papua

4.6 Pembangunan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Mitigasi Bencana

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang tangguh, ulet, dan memiliki potensi untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mencari solusi berbagai ancaman yang akan membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa. Salah satu ancaman tersebut ada pada bidang lingkungan hidup. Ancaman ketahanan nasional bidang lingkungan hidup di Indonesia dapat berasal dari perubahan iklim, bencana alam, pencemaran lingkungan oleh bahan berbahaya, dan lain sebagainya.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang terletak di antara dua benua dan dua samudera – dan dijuluki *ring of fire* karena berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang saling bertabrakan – dapat dikatakan sebagai negeri dengan “seribu bencana”. Pada tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke tujuh dalam daftar negara-negara paling rawan di dunia (Prihatin, 2018).

Tahun 2021, pada beberapa wilayah Indonesia terjadi musibah bencana alam berupa longsor di Jawa Barat, gempa di Provinsi Sulawesi Barat, banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, banjir dan longsor di Manado, badai dan angin topan di NTT, hingga erupsi Gunung Semeru. Potensi bencana alam di Indonesia akan selalu ada sehingga perlu meningkatkan ketahanan nasional, salah satunya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dengan melakukan kajian, pemetaan standar resiliensi hingga meningkatkan kapasitas resiliensi nasional.

Banyak pakar yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini disebut belum memiliki standar mitigasi bencana sebagaimana layaknya yang ada di negara-negara rawan bencana lainnya seperti Jepang dan Australia. Sistem peringatan dini hingga budaya mitigasi juga belum menjangkau seluruh elemen masyarakat, bahkan di lingkungan aparat pemerintahan sekalipun, termasuk pemerintah daerah. Pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana belum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Alawiyah et al., 2019). Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian yang serius terhadap mitigasi bencana, sehingga nantinya Pemerintah dapat memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi bencana dan memiliki strategi mitigasi yang jitu bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang berpotensi rawan bencana.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan permasalahan aktual di daerah yang berhasil diserap selama Tahun Sidang 2020-2021, terangkum beberapa usulan program sebagai berikut:

Tabel 9. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
Pembangunan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Mitigasi Bencana	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Perlu penataan dan pelestarian destinasi wisata budaya dan lingkungan.	Bali Sulawesi Utara Kalimantan Barat DI Yogyakarta
		Perlu pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan.	Bangka Belitung Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan
		Perlu pelestarian hutan dan pencegahan kebakaran hutan.	NTB Sulawesi Tengah Sumatera Selatan Riau Bali Sulawesi Barat Gorontalo
		Perlu peningkatan pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	Lampung Kalimantan Timur

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
		Perlu rehabilitasi dan pemulihan kerusakan SDA dan lingkungan hidup.	Sumatera Selatan Riau Bali Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Utara
		Perlu peningkatan penanganan dan pengolahan limbah perusahaan/rumah tangga.	Sumatera Utara Jawa Barat Kalimantan Barat
		Perlu pengawasan pertambangan tradisional/masyarakat dan pertambangan illegal.	Jawa Barat Banten Bangka Belitung Kalimantan Timur Aceh Kalimantan Tengah Maluku Maluku Utara
		Perlu pengawasan dan penindakan yang maksimal terhadap pertambangan liar, serta perusakan hutan.	NTB D.I. Yogyakarta Sumatera Utara Riau Bali Sulawesi Selatan Bangka Belitung Sumatera Barat Papua Sulawesi Utara Jawa Barat Lampung
	2. Peningkatan Mitigasi Bencana	Perlu peningkatan koordinasi yang optimal antarlembaga pemerintahan dalam penanganan bencana alam.	NTB D.I. Yogyakarta Sumatera Utara Riau Bali Sulawesi Selatan Bangka Belitung Sumatera Barat Papua Sulawesi Utara
		Perlu penanggulangan kebanjiran sawah, yang seringkali disebabkan oleh tanggul yang jebol..	Riau Sulawesi Barat Sumatera Utara Sulawesi Utara Jawa Timur Sumatera Barat Bangka Belitung Bengkulu Kalimantan Timur Kalimantan Timur Lampung Sumatera Barat

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
		Perlu peningkatan mitigasi tanah longsor dengan pendekatan kearifan lokal yang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.	D.I. Yogyakarta Jawa Barat
		Kendala-kendala mitigasi bencana yang sering terjadi di banyak daerah antara lain distribusi kelompok relawan yang tidak merata, kapabilitas peralatan mitigasi masih terbatas, belum ada rencana kontinjensi bencana tanah longsor, dan beberapa kendala lainnya.	Lampung Maluku Sumatera Selatan NTT Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Jawa Tengah Sulawesi Tenggara
		Perlu dilakukan penyusunan *disaster management plan* di setiap daerah, yang merupakan rencana umum dan menyeluruh seluruh tahapan/ bidang kerja kebencanaan yang dilaksanakan dalam situasi tidak terjadi bencana (pra-bencana).	Sulawesi Selatan Jawa Tengah Sumatera Barat

4.7 Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan

Stabilitas artinya mantap, kokoh, dan tidak goyah. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, stabilitas dapat diartikan sebagai keadaan yang tenang dan jauh dari berbagai macam gejolak. Karenanya stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan tentu sangat dibutuhkan oleh setiap bangsa dan negara, sebab jika suatu bangsa atau negara terus-menerus disibukkan dengan berbagai macam gejolak maka dapat dipastikan pembangunan di berbagai bidang lainnya tidak dapat berjalan dengan baik (Kusmanto, 2016; Media Aliansi Indonesia, 2017).

Stabilitas politik, hukum, dan keamanan yang terjaga merupakan kunci terciptanya rasa aman bagi warga negara. Perlindungan terhadap warga dari bahaya penyalahgunaan narkoba misalnya, atau ancaman terorisme dan radikalisme dapat menjadi prioritas bagi pemerintahan. Pendekatan *soft power* yang dilakukan untuk menanggulangi terorisme dan radikalisme dianggap tepat dan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia (Ansori et al., 2019). Melalui program pencegahan dan penindakan, Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat guna menciptakan rasa aman.

Stabilitas politik, hukum, dan keamanan sangat penting dalam upaya meningkatkan investasi, menumbuhkan daya saing masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan ekonomi. Namun demikian, stabilitas politik, hukum, dan keamanan tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang otoriter, melainkan

dengan berbasis pada asas-asas demokrasi sehingga mendorong Indonesia menjadi semakin maju.

Berdasarkan hal tersebut dan memperhatikan permasalahan aktual di daerah yang berhasil diserap selama Tahun Sidang 2020-2021, terangkum beberapa usulan program sebagai berikut:

Tabel 10. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan	1. Penguatan Sistem Hukum dan Upaya Anti Korupsi	Perlu evaluasi pengelolaan dana desa karena maraknya dugaan penyimpangan.	Banten Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Sulawesi Utara Sumatera Utara Sulawesi Barat Lampung
		Perlu pelarangan tegas terhadap pengerahan Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan politik praktis.	Bali NTB Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Bangka Belitung Bengkulu Sumatera Selatan Aceh Kepulauan Riau Gorontalo
		Perlu sosialisasi massif mengenai pelarangan isu SARA dalam Pilkada/Pemilu.	Sulawesi Utara Bengkulu Aceh DKI Jakarta
		Perlu perbaikan infrastruktur lapas dan peningkatan kualitas SDM pengelola lapas.	DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan
	2. Penanggulangan Radikalisme, Terorisme dan Peningkatan Keamanan Siber	Perlu peningkatan sinergitas antara pihak POLRI/TNI dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban.	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Kalimantan Timur Kalimantan Barat Papua Bengkulu Jambi Sumatera Barat Kepulauan Riau Sumatera Utara Sulawesi Utara Riau

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
		Perlu peningkatan kerja sama dengan ormas keagamaan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme.	D.I. Yogyakarta DKI Jakarta Jawa Barat Bali Sulawesi Tenggara Bali Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sumatera Barat DKI Jakarta Banten Gorontalo
		Perlu peningkatan pengawasan dan sosialisasi mengenai bahaya radikalisme dan terorisme.	DI Yogyakarta Gorontalo Bali Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sumatera Barat DKI Jakarta Banten Gorontalo
		Pemerintah perlu memberikan perhatian dan melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi maraknya kegiatan yang terindikasi mengajarkan paham komunisme maupun kegiatan sejenis berkedok agama.	Sumatera Barat DKI Jakarta Sulawesi Tengah Sumatera Utara D.I. Yogyakarta
		Perlu antisipasi atas meningkatnya kasus penipuan perdagangan melalui internet (*online*).	Bali NTB NTT Lampung
		Perlu penanganan atas maraknya penyebaran berita *hoax* di internet/ media sosial.	DKI Jakarta Bali Lampung Sumatera Barat D.I. Yogyakarta Papua Barat Bengkulu Jawa Barat
	3. Penanggulangan Narkoba dan Penguatan Kamtibmas	Perlu peningkatan pemberantasan *illegal trafficking* antar negara.	Kalimantan Barat Kepulauan Riau
		Perlu peningkatan pemberantasan peredaran narkoba	Sulawesi Utara Sumatera Utara Bali Sulawesi Barat Lampung Jambi Aceh

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
		Perlu pemberantasan tindakan kriminal bersenjata.	Maluku Sulawesi Tengah Sumatera Utara D.I. Yogyakarta DKI Jakarta Sulawesi Utara Sumatera Utara
		Perlu tindakan atas maraknya aksi main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah sosial.	DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan
		Perlu peningkatan kapasitas polisi pamong praja.	DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Timur Sulawesi Selatan

4.8 Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan (Fagi, 2014; *The Food and Agriculture Organization* (FAO), 2006). *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, baik secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Sedangkan pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. *Food and Agriculture Organization* (FAO) menambahkan komponen keempat, yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang (The Food and Agriculture Organization (FAO), 2006).

Pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan yaitu menjamin kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu/rumah tangga dari produksi pangan nasional yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan menjangkau di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Asmawi, 2009).

Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi empat subsistem, yaitu (1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (2) distribusi pangan yang lancar dan merata, (3) konsumsi

pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, (4) status gizi masyarakat (Isbandi & Rusdiana, 2014). Tujuan kunci untuk meningkatkan status ketahanan pangan mencakup pencapaian swasembada bahan pangan melalui peningkatan produksi domestik. Strategi kunci untuk mencapai swasembada termasuk meningkatkan produktivitas, memperluas area tanam, dan melindungi lahan budidaya dari konversi ke penggunaan lahan lainnya. *Global Food Security Index* (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Global yang dirilis The Economist Group menempatkan Indonesia pada posisi 65 dari 113 negara untuk ketahanan pangan pada tahun 2020 (The Economist Group, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas yang kemudian disandingkan dengan permasalahan di daerah yang terdapat dalam tabulasi aspirasi masyarakat daerah selama Tahun Sidang 2020-2021, terangkum beberapa usulan program sebagai berikut:

Tabel 11. Usulan Program Kebijakan Daerah Bidang Ketahanan Pangan

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
Penguatan Ketahanan Pangan	1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat	Pengembangan Komoditas padi sawah dan pengembangan komoditas jagung, serta budidaya rumput laut.	Papua Jawa Tengah Aceh Lampung Sulawesi Tenggara
		Pengurangan pupuk kimia dalam proses produksi pangan	Sumatera Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta
		Peningkatan Gerakan Stabilitas Harga Pangan (GHSP), seperti harga gabah.	Sumatera Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Bali Sulawesi Barat Lampung
		Banyak lahan pertanian dan tanah kas Desa yang sudah berubah fungsi menjadi perumahan, hotel, mall atau rusunawa.	D.I. Yogyakarta; Jawa Barat
		Petani hanya butuh ketersediaan bibit dan pupuk pada waktu tanam, dan kestabilan harga di waktu panen. Namun selama ini mereka kesulitan karena pupuk tidak ada sewaktu dibutuhkan, kalau pun ada harganya tinggi.	Lampung; Maluku; Sumatera Selatan; NTT; Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan; Jawa Tengah; Sumatera Barat; Sulawesi Tenggara
		Minimnya sarana dan prasarana bidang perikanan tidak sebanding dengan potensi kelautan daerah yang menjadi lumbung ikan nasional	NTT NTB Maluku Utara

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
	2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pangan Bagi Masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan kepada petani.	Sumatera Utara Papua Jawa Timur Bangka Belitung NTB
		Pembuatan jalan atau akses menuju ke perkebunan untuk mengangkut hasil pertanian dari kebun yang tidak terlalu besar.	Sulawesi Utara Aceh
		Daya saing produk perikanan tangkap yang masih rendah, kurang berkembangnya pasar domestik untuk produk perikanan tangkap dan pengamanan kualitas ikan.	Gorontalo NTT Kalimantan Barat Sumatera Selatan
		Perlu memberikan bantuan modal usaha perikanan kepada nelayan, atau bantuan alat tangkap ikan dan alat transportasi penangkapan ikan kepada nelayan.	Maluku Papua Papua Barat
		Tenaga penyuluh Perikanan yang ada selama ini dirasakan sangat kurang dalam melakukan interaksi dengan masyarakat sehingga kehadiran mereka kurang dirasakan manfaatnya.	D.I Yogyakarta Bengkulu Gorontalo Maluku Bali
	3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan Bagi Masyarakat	Pembentukan kelembagaan yang menampung hasil panen petani sehingga dapat mengendalikan sendi *on-farm* dan *off-farm* guna meningkatkan nilai tambah.	D.I Yogyakarta Bengkulu Gorontalo Maluku Bali
		Peningkatan usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, energi dan sumber daya mineral serta industri jasa maritim.	Aceh Sulawesi Tenggara Kalimantan Timur
		Pelatihan pengelolaan hasil pertanian melalui penyuluhan dan pembinaan kelompok pengolah hasil perikanan dibarengi dengan penyediaan bantuan alat-alat perikanan yang mumpuni.	NTT NTB Sulawesi Utara Sumatera Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Jambi Banten
		Masalah pengembangan usaha perikanan nelayan di daerah terkendala sarana prasarana dan permodalan dan rendahnya kompetensi petani tambak ikan.	NTT NTB
		Pembangunan infrastruktur pengolahan hasil pertanian.	Bangka Belitung Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Sumatera Utara Sumatera Barat

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	USULAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH		PROVINSI
	USULAN PROGRAM PRIORITAS	SUBSTANSI ASPIRASI	
		Nelayan berharap kepada pemerintah untuk mendirikan lembaga khusus yang dapat memberikan permodalan atau kredit lunak untuk memajukan usaha perikanan.	Sumatera Barat Bangka Belitung Kepulauan Riau Sumatera Utara Sulawesi Tengah
		Nelayan berharap pemerintah dapat mengembangkan industri maritim secara lebih serius. Pengembangan ini dinilai penting agar nelayan tidak selalu hidup dalam berbagai keterbatasan di tengah potensi maritim yang sedemikian besar.	Sumatera Barat Bangka Belitung Kepulauan Riau Sumatera Utara Sulawesi Tengah
		Perlu mengatur proses pemasaran dan pengolahan produk perikanan sehingga memberikan nilai tambah kepada para nelayan.	Papua Bengkulu NTT Jawa Timur Jawa Tengah Aceh

BAB V
PROYEKSI INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAERAH TAHUN 2022

5.1 Asumsi

Setelah dilakukan simulasi terhadap model, dan telah memenuhi kriteria berdasarkan tanda dan besaran ekonomi (*magnitude* dan *sign*) dan juga kriteria statistik, maka model selanjutnya digunakan sebagai *tools* untuk melakukan proyeksi indikator ekonomi daerah. Indikator ekonomi daerah diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan dan tingkat inflasi daerah dengan beberapa asumsi yang dibangun. Asumsi yang digunakan dalam melakukan proyeksi indikator makro daerah dibagi dalam 3 skenario yaitu *baseline*, moderat dan optimis. Berikut adalah adalah asumsi yang digunakan:

Tabel 12. Asumsi Baseline Ekonomi Makro

Variabel	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Rp terhadap USD	Rp/USD	15000	15200	15200	14400	14400
Harga BBM Bersubsidi Gasoline	Rp/liter	7500	7500	7500	6550	6550
Laju Kenaikan Uang Beredar M1	persen	10	5	5	5	5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Dunia	Persen	-1	1	1.2	3	3
BI Rate (7 day Repo)	Persen	5	6.25	5.25	5.25	5.25

Sumber: Analisis Model Puskadaran 2021

Tabel 13. Asumsi Baseline, Moderat dan Optimis

Variabel yang Dikontrol	Skenario			Keterangan
	Baseline	Moderat	Optimistik	
Nilai Tukar Rp terhadap USD	0.0%	1.0%	1.5%	(-) Apresiasi, (+) Depresiasi
Persen Kenaikan Tarif Listrik	0.0%	0.0%	0.0%	(0) Harga Tidak mengalami perubahan
Harga BBM Transportasi Bersubsidi	0.0%	1.5%	1.0%	(-) harga menurun ==> lebih baik bagi perekonomian
Persen Kenaikan Uang Beredar M1	0.0%	1.0%	1.0%	(+) jumlah meningkat ==> perekonomian berkembang
Persen Pertumbuhan GDP Dunia	0.0%	1.0%	1.5%	(+) bertumbuh lebih cepat
Upah Minimum Provinsi	0.0%	2.5%	1.0%	(-) upah menurun==> mengurangi tekanan biaya produksi
Kenaikan Outstanding Kredit	0.0%	2.5%	5.0%	(+) bertumbuh lebih cepat
Belanja Modal Pemerintah Daerah	0.0%	5.0%	10.0%	(+) bertumbuh lebih cepat
BI Rate	0.0%	2.5%	2.0%	(-) tingkat bunga menurun ==> biaya modal berkutang
Belanja Modal Pemerintah Pusat	0.0%	10.0%	15.0%	(+) bertumbuh lebih cepat

Sumber: Analisis Model Puskadaran 2021

Asumsi yang dibangun berguna untuk memprediksi nilai-nilai indikator makro ekonomi daerah. Tentu asumsi ini tidak rigid. Kementerian dalam hal ini Bappenas dapat mengubah sesuai peraturan dan kebijakan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah sehingga Pemerintah dapat mengetahui berapa nilai proyeksi dari indikator makro daerah. Pemodelan dimaksud disimulasikan melalui aplikasi Makroekonometrika Postur Anggaran Negara (MAPAN).

Gambar 4. Dashboard MAPAN Puskadaran

Berikut adalah hasil proyeksi yang dihasilkan.

5.2 Perkembangan Makro Ekonomi Daerah Tahun 2020

Dampak Covid-19 pada tahun 2020 dapat dirasakan di hampir semua daerah kecuali Provinsi Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Papua. Di luar ketiga provinsi tersebut, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah mengalami kontraksi. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi di Provinsi Bali, Banten dan Provinsi Kepulauan Riau (Tabel 14). Covid-19 telah mengubah perilaku masyarakat bahkan arah pembangunan ekonomi.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah tentu berdampak pada kenaikan jumlah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 9.78% dan meningkat menjadi 10.19% pada tahun 2020 (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 menyebabkan terjadinya *structural break* pada tahun 2020 sehingga kemiskinan nasional tumbuh sebesar 4.19% (YoY). Tidak hanya di level nasional, di tingkat daerah juga sangat dirasakan adanya pengaruh negatif pandemi Covid-19, yang ditunjukkan dengan meningkatnya laju penduduk miskin di daerah. Laju pertumbuhan tingkat kemiskinan yang lebih dari satu digit terjadi di provinsi Bali (17.72 % YoY), provinsi Banten (11.99% YoY) dan Provinsi Kalimantan Selatan (10.27% YoY). Fakta data ini menunjukkan bahwa Covid-19 merupakan momok bagi Indonesia dan harus cepat diatasi agar perekonomian nasional dan daerah segera pulih.

Kasus pandemi Covid-19 di Indonesia telah merusak dan melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti *Work From Home* (WFH), pembatasan wilayah, dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau perkantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan (PHK) sebagai antisipasi dampak penutupan usaha dalam waktu yang belum ditentukan. Indikator pengangguran terbuka juga mengalami peningkatan. Hal tersebut menyebabkan angka pengangguran di Indonesia meningkat.

Pada bulan Februari 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional adalah sebesar 4.94 persen dan pada bulan Agustus 2020 meningkat menjadi 7.07%. Hal ini menunjukkan terjadi laju peningkatan TPT sebesar 34.12%. Tidak hanya di tingkat nasional, daerah juga mengalami laju peningkatan TPT rata-rata dua digit, bahkan ada dua provinsi yang mencapai tiga digit, yaitu Provinsi Bali (350.40%) dan Provinsi DKI Jakarta (112.62%). Tiga provinsi dengan laju TPT hanya satu digit yaitu provinsi Lampung, Kalimantan Timur dan Provinsi Papua Barat. Satu provinsi yang mengalami penurunan TPT yaitu provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 14. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020 (Persen)

No	Provinsi	Growth	Kemiskinan	TPT	Inflasi
0	Nasional	-2.02	7.07	7.07	1.65
1	Aceh	-0.37	6.59	6.59	2.94
2	Sumatera Utara	-1.07	6.91	6.91	2.37
3	Sumatera Barat	-1.60	6.88	6.88	0.37
4	Riau	-1.12	6.32	6.32	4.08
5	Jambi	-0.46	5.13	5.13	4.07
6	Sumatera Selatan	-0.11	5.51	5.51	4.40
7	Bengkulu	-0.02	4.07	4.07	1.75
8	Lampung	-1.67	4.67	4.67	6.55
9	Kep. Bangka Belitung	-2.30	5.25	5.25	2.54
10	Kep. Riau	-3.80	10.34	10.34	3.44
11	DKI Jakarta	-2.36	10.95	10.95	2.88
12	Jawa Barat	-2.44	10.46	10.46	0.14
13	Jawa Tengah	-2.65	6.48	6.48	0.50
14	DI Yogyakarta	-2.69	4.57	4.57	1.62
15	Jawa Timur	-2.39	5.84	5.84	0.35
16	Banten	-3.38	10.64	10.64	1.43
17	Bali	-9.31	5.63	5.63	0.54
18	Nusa Tenggara Barat	-0.64	4.22	4.22	0.86
19	Nusa Tenggara Timur	-0.83	4.28	4.28	2.75
20	Kalimantan Barat	-1.82	5.81	5.81	3.29
21	Kalimantan Tengah	-1.40	4.58	4.58	8.61
22	Kalimantan Selatan	-1.81	4.74	4.74	8.16
23	Kalimantan Timur	-2.85	6.87	6.87	4.92

No	Provinsi	Growth	Kemiskinan	TPT	Inflasi
24	Kalimantan Utara	-1.11	4.97	4.97	1.48
25	Sulawesi Utara	-0.99	7.37	7.37	1.61
26	Sulawesi Tengah	4.86	3.77	3.77	4.29
27	Sulawesi Selatan	-0.70	6.31	6.31	0.65
28	Sulawesi Tenggara	-0.65	4.58	4.58	1.52
29	Gorontalo	-0.02	4.28	4.28	1.29
30	Sulawesi Barat	-2.42	3.32	3.32	2.01
31	Maluku	-0.92	7.57	7.57	1.53
32	Maluku Utara	4.92	5.15	5.15	4.09
33	Papua Barat	-0.77	6.8	6.8	2.45
34	Papua	2.32	4.28	4.28	0.58

Sumber: BPS, 2021 dan Puskadaran, 2021

Ketidakpastian global yang terjadi selama tahun 2019 telah memberikan pengaruh pada perekonomian dunia baik pada pertumbuhan ekonomi maupun harga komoditas. Harga komoditas global cenderung relatif stabil di tengah perlambatan ekonomi dunia. Capaian inflasi dunia tahun 2019 sesuai dengan prediksi IMF pada bulan April 2019 yang menyatakan bahwa inflasi dunia akan relatif stabil di kisaran 3.6 persen selama dua tahun berturut-turut yakni tahun 2019 dan 2020. Di antara negara berkembang, negara yang cukup besar skala ekonominya yaitu Tiongkok dan India. Kondisi inflasi di negara Tiongkok selama tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 2.1 persen menjadi 2.9 persen. Angka ini juga melebihi prediksi IMF (April, 2019) yang memperkirakan bahwa angka inflasi di Tiongkok akan sebesar 2.3 persen. Untuk wilayah kawasan ASEAN menurut ADB (2020), inflasi di kawasan ini mengalami penurunan dari 2,6 persen pada tahun 2018 menjadi 2,1 persen pada tahun 2019. Laju inflasi ini lebih rendah dari proyeksi ADB pada awal 2019 sebesar 2,6 persen (BPS, 2020).

Inflasi Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 2.7 persen atau lebih rendah dibandingkan inflasi 2018 yang sebesar 3,1 persen. Angka inflasi ini masih berada di kisaran target Pemerintah antara 2.5 - 4.5 persen. Pencapaian ini juga meneruskan pencapaian yang terus menerus berada di kisaran target selama 4 tahun terakhir. Pada Tahun 2020 inflasi Indonesia adalah sebesar 1.65 persen. Menurut ADB (2020), rendahnya inflasi di Indonesia disebabkan oleh terjaganya permintaan dalam negeri dan terapresiasinya nilai tukar rupiah, serta rendahnya inflasi kelompok *Administered Price*. Inflasi yang rendah juga disebabkan oleh keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga pangan.

5.3 Proyeksi Makro Ekonomi Daerah

5.3.1 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Sebagai dampak pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan terkontraksi -3.0 persen oleh IMF di tahun 2020 (IMF, WEO April 2020). IMF mengkategorikannya sebagai pertumbuhan yang cukup parah selama 10 tahun terakhir, lebih buruk dibandingkan krisis keuangan global 2009. Sementara itu, dengan masih rendahnya harga minyak dunia, perkiraan inflasi dunia masih di kisaran 3.0 persen. IMF juga memproyeksikan ekonomi di negara maju akan mengalami kontraksi ekonomi yang cukup parah. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi di negara maju berada di angka -6.0 persen. Sementara itu, IMF juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang akan berada pada masa yang cukup sulit dengan terjadinya kontraksi ekonomi. Namun, kontraksi ekonomi yang dijumpai di negara berkembang tidak akan lebih parah dibandingkan di negara maju. IMF memproyeksikan negara berkembang akan mengalami kontraksi ekonomi sebesar 1,0 persen. Selain karena dampak krisis kesehatan adanya wabah Covid-19 yang membatasi kegiatan ekonomi, penurunan kinerja ekonomi di negara berkembang juga disebabkan oleh permintaan eksternal yang menurun, keuangan global yang masih ketat, dan jatuhnya harga komoditas dunia.

Rendahnya kontraksi ekonomi negara berkembang didorong oleh masih kuatnya kinerja ekonomi di kawasan Asia yang diprediksi masih bisa tumbuh positif walaupun cukup kecil pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang di kawasan Asia diprediksi akan tumbuh sebesar 1,0 persen. Hal ini disebabkan masih cukup kuatnya ekonomi di Tiongkok dan India yang masing-masing dapat tumbuh sebesar 1,2 persen dan 1,9 persen. Tiongkok, tempat pertama yang terjangkit wabah Covid-19 mampu memulihkan ekonominya cukup kuat karena dukungan fiskal yang sangat besar dari Pemerintah.

Grafik 18. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi 2021

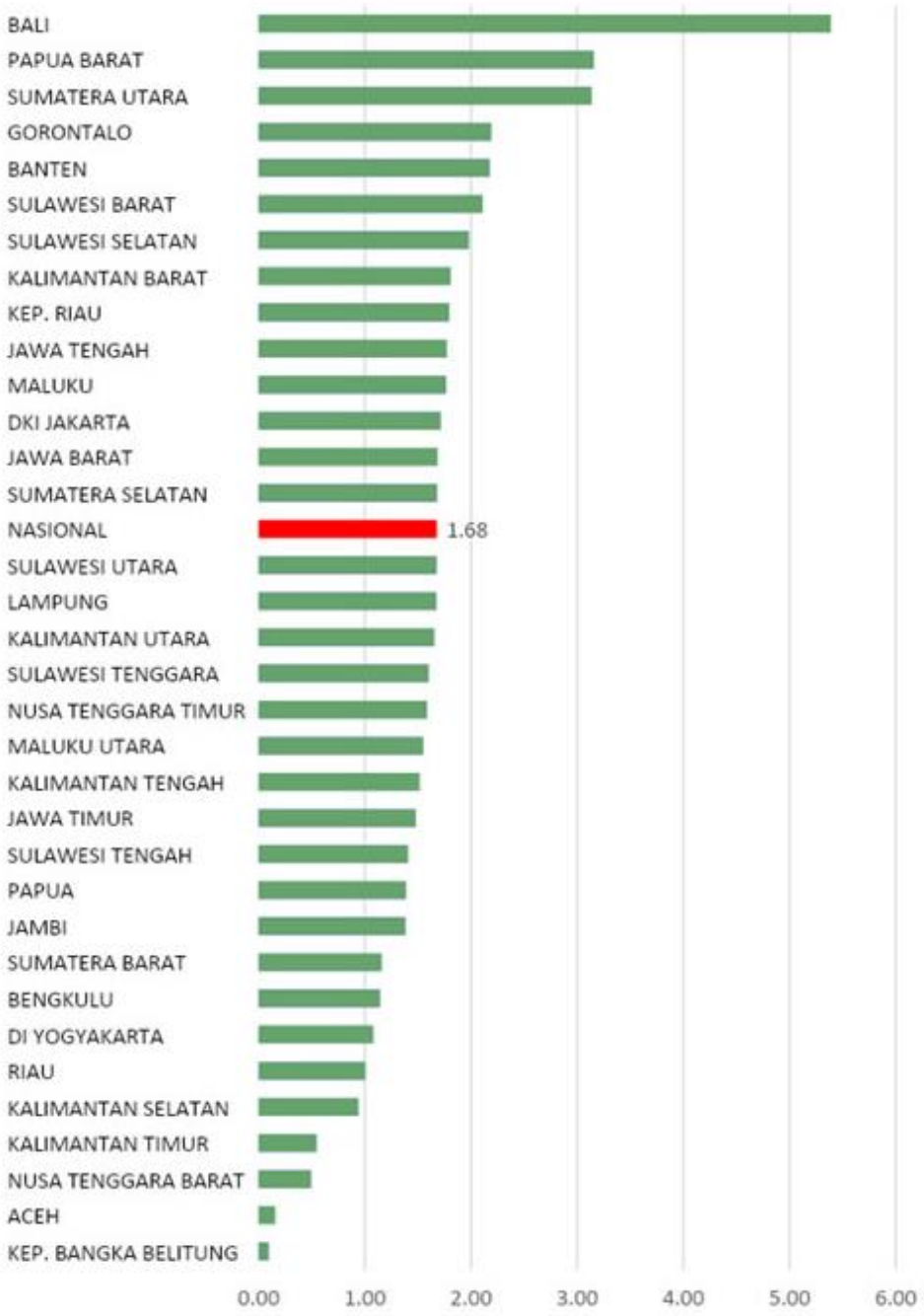

Sumber: Analisis Model Puskadaran, 2021

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh sebesar 1.68 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Jika perekonomian nasional dan daerah telah kembali normal, dan arus pergerakan tidak dibatasi (tetap dalam protokol kesehatan), maka diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Provinsi Bali akan tumbuh sebesar 5.39 persen. Pada kondisi normal, pertumbuhan ekonomi daerah akan tumbuh di atas nasional (1.68 persen). Pertumbuhan ekonomi daerah yang rata-rata di atas nasional terjadi di 14 provinsi, sementara

pertumbuhan ekonomi daerah di bawah rata-rata nasional diperkirakan terjadi di 19 provinsi. Tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi dengan 3 skenario baseline, moderat dan optimis ditampilkan pada Tabel 15.

Tabel 15. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Tahun 2021-2022

No	Provinsi	Baseline		Moderat		Optimis	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
0	Nasional	1.68	2.17	3.19	3.64	3.93	4.35
1	Aceh	0.16	0.56	1.02	1.44	1.46	1.87
2	Sumatera Utara	3.14	1.14	4.37	2.26	4.98	2.82
3	Sumatera Barat	1.16	2.20	2.66	3.66	3.40	4.37
4	Riau	1.00	1.12	1.22	1.32	1.34	1.42
5	Jambi	1.38	1.56	2.73	2.90	3.40	3.55
6	Sumatera Selatan	1.68	1.81	3.16	3.28	3.88	3.99
7	Bengkulu	1.14	1.77	2.37	2.98	2.98	3.58
8	Lampung	1.67	2.01	3.20	3.50	3.95	4.23
9	Kep. Bangka Belitung	0.10	2.03	2.09	3.96	3.07	4.88
10	Kep. Riau	1.80	1.37	2.23	1.80	2.45	2.01
11	DKI Jakarta	1.72	3.25	3.24	4.72	3.97	5.41
12	Jawa Barat	1.68	2.10	3.31	3.69	4.10	4.46
13	Jawa Tengah	1.77	2.15	2.93	3.28	3.52	3.86
14	DI Yogyakarta	1.08	2.04	2.45	3.38	3.13	4.05
15	Jawa Timur	1.48	2.25	3.09	3.81	3.89	4.58
16	Banten	2.18	1.82	4.02	3.63	4.92	4.51
17	Bali	5.39	5.95	6.20	6.61	7.09	4.41
18	Nusa Tenggara Barat	0.49	1.69	5.13	6.05	7.19	7.89
19	Nusa Tenggara Timur	1.59	1.78	3.26	3.42	4.07	4.22
20	Kalimantan Barat	1.81	1.74	3.38	3.29	4.16	4.05
21	Kalimantan Tengah	1.52	2.21	3.41	4.03	4.30	4.91
22	Kalimantan Selatan	0.94	2.12	2.32	3.46	3.00	4.12
23	Kalimantan Timur	0.55	1.24	1.72	2.47	2.33	3.09
24	Kalimantan Utara	1.65	5.39	4.75	8.33	6.24	9.70
25	Sulawesi Utara	1.68	2.48	3.61	4.34	4.56	5.24
26	Sulawesi Tengah	1.41	4.58	3.59	6.59	4.68	7.59
27	Sulawesi Selatan	1.98	2.55	3.97	4.45	4.93	5.37
28	Sulawesi Tenggara	1.60	2.77	4.24	5.28	5.50	6.45
29	Gorontalo	2.19	2.13	3.91	3.81	4.76	4.63
30	Sulawesi Barat	2.11	2.95	4.68	5.36	5.89	6.48
31	Maluku	1.77	2.08	3.45	3.73	4.28	4.53
32	Maluku Utara	1.55	3.05	3.74	5.10	4.80	6.07
33	Papua Barat	3.16	0.27	4.54	1.72	5.22	2.42
34	Papua	1.39	2.47	3.33	4.33	4.27	5.22

Sumber: Analisis Model Puskadaran, 2021

5.3.2 Kemiskinan

Sebagai respons atas pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan PERPPU No 1 Tahun 2020 yang diikuti dengan terbitnya PERPRES No 54 Tahun 2020, dimana arah kebijakan APBN adalah mengutamakan penggunaan anggaran negara untuk penanganan pandemi Covid-19. APBN difokuskan pada belanja untuk keperluan: (1) kesehatan; (2) jaring pengaman sosial; dan (3) pemulihan perekonomian. Melalui upaya Pemerintah tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran, tingkat kesenjangan antardaerah dan tingkat kemiskinan. Tingkat

kemiskinan pada tahun 2021 secara nasional diperkirakan sebesar 8.95% (Grafik 19).

Grafik 19. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Daerah Provinsi Tahun 2021

Sumber: Analisis Model Puskadaran, 2021

Tingkat kemiskinan tertinggi diperkirakan berada di Provinsi Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pada kondisi normal diperkirakan tingkat kemiskinan nasional cenderung mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 sebesar 8.30 persen (skenario optimis). Pemerintah berkewajiban menyiapkan stimulus ekonomi yang akan difokuskan untuk

sektor kesehatan dan menjangkau jaring sosial. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program Pemerintah seperti program keluarga harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non tunai, dan terus berupaya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi subsidi agar lebih tepat sasaran dan memberi manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan.

Tabel 16. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Daerah Provinsi Tahun 2021-2022

No	Provinsi	Baseline		Moderat		Optimis	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
0	Nasional	8.95	8.71	8.74	8.44	8.63	8.30
1	Aceh	15.36	15.21	15.18	14.97	15.09	14.86
2	Sumatera Utara	9.38	9.53	9.29	9.45	9.24	9.41
3	Sumatera Barat	5.96	5.87	5.71	5.53	5.58	5.36
4	Riau	7.25	7.16	7.23	7.14	7.22	7.12
5	Jambi	7.40	7.29	7.28	7.13	7.22	7.04
6	Sumatera Selatan	13.25	13.09	12.94	12.78	12.79	12.63
7	Bengkulu	13.92	13.72	13.65	13.35	13.51	13.16
8	Lampung	12.05	11.75	11.02	10.97	10.87	10.42
9	Kep. Bangka Belitung	4.12	4.10	3.75	3.56	3.56	3.28
10	Kep. Riau	5.78	5.84	5.69	5.71	5.64	5.65
11	DKI Jakarta	3.69	3.69	3.66	3.65	3.64	3.62
12	Jawa Barat	7.04	6.90	6.46	6.13	6.16	5.72
13	Jawa Tengah	10.41	10.13	9.98	9.54	9.75	9.22
14	DI Yogyakarta	10.85	10.61	10.38	9.97	10.14	9.63
15	Jawa Timur	10.15	10.12	10.57	10.68	10.76	10.95
16	Banten	5.08	5.07	4.85	4.77	4.73	4.62
17	Bali	4.38	4.32	4.12	4.10	4.19	4.08
18	Nusa Tenggara Barat	9.09	6.34	8.68	5.82	8.47	5.55
19	Nusa Tenggara Timur	20.65	20.78	21.14	21.38	21.33	21.63
20	Kalimantan Barat	8.20	8.27	7.32	7.09	6.80	6.39
21	Kalimantan Tengah	4.15	4.02	3.84	3.57	3.69	3.35
22	Kalimantan Selatan	4.00	4.24	3.67	3.80	3.71	3.85
23	Kalimantan Timur	5.97	5.93	6.00	5.97	6.00	5.96
24	Kalimantan Utara	7.40	7.06	7.40	7.01	7.24	7.05
25	Sulawesi Utara	11.51	11.56	10.60	10.33	10.12	9.68
26	Sulawesi Tengah	13.53	12.86	13.28	12.65	13.12	12.51
27	Sulawesi Selatan	8.37	8.25	8.37	8.26	8.37	8.26
28	Sulawesi Tenggara	13.15	12.50	12.07	11.50	11.57	11.05
29	Gorontalo	17.14	17.09	15.97	15.55	15.33	14.71
30	Sulawesi Barat	10.34	10.14	10.11	9.84	9.99	9.68
31	Maluku	16.67	16.16	16.45	15.95	16.35	15.85
32	Maluku Utara	6.75	6.59	6.55	6.37	6.44	6.26
33	Papua Barat	20.96	20.91	20.00	19.67	19.51	19.04
34	Papua	26.22	25.86	25.96	25.50	25.83	25.32

Sumber: Analisis Model Puskadaran, 2021

5.3.3 Pengangguran

Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada perekonomian negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Wabah Covid-19 ini memberikan pengaruh negatif pada kondisi perekonomian nasional dan daerah, terutama pada dunia usaha dan pasar tenaga kerja.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan berkurangnya jumlah jam kerja.

Sejumlah sektor ekonomi andalan mengalami dampak penurunan yang cukup signifikan, seperti akomodasi dan jasa makanan, manufaktur, perdagangan grosir dan eceran, serta perumahan dan kegiatan bisnis. Pekerja di sektor informal juga sangat rentan terdampak krisis Covid-19. Sebagian besar pekerja informal ini menggantungkan pemenuhan kebutuhannya dari pendapatan harian, sehingga beresiko jatuh lebih dalam ke masalah kemiskinan. Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga tidak memiliki perlindungan dasar, termasuk jaminan perlindungan sosial. Dengan demikian, mereka tidak mendapatkan penggantian pendapatan jika mereka tidak dapat bekerja di saat sakit (*International Labour Organization*, 2020).

Pasar tenaga kerja di Indonesia juga terkena imbas dari pandemi Covid-19. Terguncangnya perekonomian dan dunia usaha menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya kasus PHK di Indonesia. Dirjen Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPPHI) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini mengakibatkan cukup banyaknya pekerja yang dirumahkan/PHK. Sampai dengan 27 Mei 2020, Kemenaker mencatat sebanyak 1.046.306 pekerja formal yang dirumahkan, 378.096 pekerja formal mengalami PHK, dan 318.000 pekerja informal yang terdampak. Namun, masih banyak kasus yang masih dalam proses verifikasi, sebanyak hampir satu juta kasus. Dari sisi wilayah, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tenaga kerja terdampak terbesar, yaitu sebanyak 318.338 pekerja yang dirumahkan dan yang terkena PHK. Selanjutnya, provinsi dengan jumlah pekerja terdampak terbesar berikutnya diikuti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Riau (CNBC Indonesia, 2020).

Dampak Covid-19 ini terus menjadi perhatian Pemerintah. Pemerintah berupaya menyusun kebijakan di awal pandemi untuk memitigasi dampak Covid-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Presiden Jokowi menyampaikan terdapat enam hal untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama, program stimulus ekonomi perlu segera diimplementasikan dan diutamakan diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen untuk tidak melakukan PHK. Kedua, Pemerintah perlu memastikan skema program yang meringankan beban pekerja, seperti insentif pajak, relaksasi pembayaran iuran BPJS, dan keringanan pembayaran kredit. Ketiga, pekerja sektor informal yang merupakan kelompok rentan, termasuk ke dalam sasaran program jaringan pengaman sosial (*social safety net*). Keempat, kartu prakerja diprioritaskan bagi pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK. Kelima, program padat karya tunai diperbanyak agar lebih banyak menyerap tenaga kerja. Keenam,

Pemerintah juga harus memberikan perlindungan kepada para pekerja migran, baik yang sudah kembali ke Indonesia maupun yang masih berada di luar negeri (Republika.co.id, 2020). Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga membuat terobosan program padat karya. Program ini merupakan program reguler Kemenaker yang semula berbasis infrastruktur, akan tetapi seiring pandemi Covid-19 program tersebut dialihkan untuk membantu pekerja yang terdampak pandemi.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar pada pasar tenaga kerja. Kebijakan yang tanggap, cepat, dan tepat menjadi kunci dalam mengatasi krisis ini. Kebijakan yang menjangkau pekerja dan perusahaan di sektor-sektor yang terdampak parah akan memulihkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber daya yang ada juga harus digunakan sebaik-baiknya untuk mendukung perusahaan dalam mempertahankan dan/atau menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, pasar tenaga kerja dapat kembali pulih sebagaimana sebelum adanya pandemi Covid-19. Dengan upaya tersebut, diproyeksikan tingkat pengangguran terbuka secara nasional tahun 2021 adalah sebesar 5.35% (Grafik 20) dan diperkirakan cenderung menurun sebesar 5.31% hingga tahun 2022 (Tabel 17).

Grafik 20. Proyeksi Pengangguran Terbuka Daerah Provinsi Tahun 2021

Sumber: Analisis Model Puskadaran, 2021

Tahun 2021 diperkirakan terdapat sembilan provinsi dengan tingkat pengangguran di atas rata-rata nasional. Tingkat pengangguran tertinggi terdapat di Provinsi Banten, Aceh, Kepulauan Riau dan Provinsi Maluku. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka yang paling kecil pada tahun 2021 adalah Provinsi Bali. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah diharapkan tingkat pengangguran terbuka akan mempunyai kecenderungan yang membaik.

Tabel 17. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Provinsi Tahun 2021-2022 (Persen)

No	Provinsi	Baseline		Moderat		Optimis	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
0	Nasional	5.35	5.31	5.22	5.17	5.16	5.10
1	Aceh	8.60	8.35	8.19	7.95	7.99	7.75
2	Sumatera Utara	5.07	5.22	4.39	4.49	4.04	4.11
3	Sumatera Barat	4.94	4.84	4.92	4.82	4.91	4.80
4	Riau	6.34	6.29	6.31	6.25	6.29	6.23
5	Jambi	3.74	3.70	3.64	3.58	3.60	3.51
6	Sumatera Selatan	3.01	2.97	3.35	3.31	3.52	3.49
7	Bengkulu	3.47	3.43	3.47	3.43	3.47	3.43
8	Lampung	3.30	2.94	2.95	2.59	2.77	2.40
9	Kep. Bangka Belitung	3.33	3.01	3.14	2.82	3.04	2.72
10	Kep. Riau	8.16	8.37	8.13	8.34	8.12	8.33
11	DKI Jakarta	3.57	2.83	3.59	2.85	3.60	2.86
12	Jawa Barat	7.57	7.38	7.54	7.35	7.52	7.33
13	Jawa Tengah	5.21	5.20	5.12	5.11	5.08	5.07
14	DI Yogyakarta	4.06	3.85	3.75	3.54	3.60	3.38
15	Jawa Timur	4.68	4.95	4.72	5.01	4.74	5.04
16	Banten	8.76	8.69	8.44	8.37	8.28	8.21
17	Bali	1.40	1.42	1.40	1.42	1.40	1.42
18	Nusa Tenggara Barat	4.06	3.89	2.29	1.58	1.40	0.40
19	Nusa Tenggara Timur	3.50	3.38	3.25	3.12	3.12	2.98
20	Kalimantan Barat	3.53	4.54	3.40	4.36	3.33	4.26
21	Kalimantan Tengah	3.48	3.30	3.48	3.30	3.48	3.30
22	Kalimantan Selatan	4.08	3.97	4.02	3.90	3.99	3.86
23	Kalimantan Timur	6.47	6.33	6.46	6.31	6.46	6.31
24	Kalimantan Utara	5.17	4.83	5.11	4.76	5.07	4.73
25	Sulawesi Utara	6.98	6.83	7.05	6.94	7.09	6.99
26	Sulawesi Tengah	4.43	4.10	4.29	3.95	4.22	3.87
27	Sulawesi Selatan	6.44	6.42	6.23	6.14	6.13	5.99
28	Sulawesi Tenggara	2.88	2.79	2.92	2.84	2.94	2.87
29	Gorontalo	2.81	2.62	2.79	2.61	2.79	2.60
30	Sulawesi Barat	2.83	2.79	2.84	2.80	2.84	2.80
31	Maluku	8.06	7.94	8.00	7.88	7.97	7.85
32	Maluku Utara	5.22	5.06	5.19	5.03	5.18	5.01
33	Papua Barat	4.98	4.91	4.77	4.62	4.67	4.47
34	Papua	3.06	2.99	3.06	2.99	3.05	2.99

Sumber: Analisis Model Puskadaran, 2021

5.3.4 Inflasi Daerah

Pada Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,45 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,68. Dari 90 kota IHK, 87 kota mengalami inflasi dan 3 kota mengalami deflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 0,26 persen dengan IHK sebesar 107,51 dan terendah terjadi di Ambon sebesar 0,07 persen dengan IHK sebesar 105,52 (BPS,

2020). Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2020 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 1.68 (BPS, 2020). Tingkat inflasi nasional pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 2.28%, relatif stabil dan masih dalam batas target Pemerintah.

Grafik 21. Proyeksi Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2021

Sumber: Analisis Model Puskadaran, 2021

Tingkat inflasi tertinggi terdapat di Provinsi Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi dilihat berdasarkan nasional, inflasi dalam negeri diperkirakan akan tetap terkendali hingga tahun 2022. Menurut Bank Indonesia (2020), perkiraan inflasi ini ditopang oleh masih terkendalinya inflasi inti yang dipengaruhi semakin terjangkaunya ekspektasi inflasi dan permintaan yang belum cukup kuat.

Sementara itu, inflasi komponen bergejolak dan inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah mengalami peningkatan. Peningkatan inflasi komponen bergejolak disebabkan oleh faktor cuaca dan distribusi bahan makanan yang terbatas karena adanya pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat untuk memutus penyebaran Covid-19.

Tabel 18. Proyeksi Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2021-2022 (Persen)

No	Provinsi	Baseline		Moderat		Optimis	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
0	Nasional	2.28	2.37	2.80	2.85	3.05	3.09
1	Aceh	2.69	1.26	3.04	1.61	3.22	1.80
2	Sumatera Utara	3.28	2.87	3.88	3.42	4.19	3.71
3	Sumatera Barat	0.46	2.30	1.20	3.02	1.57	3.39
4	Riau	3.67	3.55	3.69	3.57	3.70	3.58
5	Jambi	4.17	4.33	4.13	4.29	4.12	4.28
6	Sumatera Selatan	4.12	4.08	4.14	4.09	4.14	4.10
7	Bengkulu	-0.69	2.53	-0.33	2.84	-0.14	3.00
8	Lampung	5.37	5.36	4.87	4.88	4.61	4.64
9	Kep. Bangka Belitung	-0.04	4.16	0.72	4.91	1.10	5.29
10	Kep. Riau	3.73	3.61	3.81	3.68	3.85	3.71
11	DKI Jakarta	2.03	3.08	2.32	3.35	2.46	3.50
12	Jawa Barat	1.14	1.67	1.82	2.34	2.17	2.69
13	Jawa Tengah	1.66	1.36	2.76	2.46	3.29	3.00
14	DI Yogyakarta	1.10	1.36	1.55	1.82	1.78	2.06
15	Jawa Timur	0.29	1.83	0.89	2.43	1.20	2.73
16	Banten	0.08	2.29	0.68	2.86	0.98	3.15
17	Bali	1.50	2.75	1.60	3.10	1.86	3.86
18	Nusa Tenggara Barat	1.44	1.74	1.74	1.96	1.90	2.09
19	Nusa Tenggara Timur	1.23	2.88	1.12	2.78	1.07	2.72
20	Kalimantan Barat	2.20	1.75	2.89	2.45	3.11	2.67
21	Kalimantan Tengah	2.84	2.30	2.80	2.30	2.47	1.95
22	Kalimantan Selatan	4.00	1.52	4.14	1.72	3.84	1.41
23	Kalimantan Timur	2.33	1.96	2.74	2.39	2.75	2.41
24	Kalimantan Utara	1.60	2.82	1.91	2.23	1.99	2.95
25	Sulawesi Utara	1.79	2.56	2.16	3.13	2.46	3.42
26	Sulawesi Tengah	2.05	2.08	2.55	2.60	2.64	2.69
27	Sulawesi Selatan	0.89	1.33	1.58	2.02	1.93	2.37
28	Sulawesi Tenggara	0.39	1.32	1.01	1.94	1.32	2.25
29	Gorontalo	1.80	1.11	2.58	1.91	2.96	2.29
30	Sulawesi Barat	1.44	0.98	2.17	1.72	2.53	2.09
31	Maluku	1.45	1.17	2.44	2.17	2.94	2.66
32	Maluku Utara	1.23	1.61	1.68	2.06	1.80	2.18
33	Papua Barat	2.77	2.75	2.55	2.93	2.45	3.03
34	Papua	1.47	1.02	2.28	1.84	2.69	2.26

Sumber: Analisis Model Puskadaran, 2021

Menurut ADB (2020), rendahnya inflasi di Indonesia disebabkan oleh terjaganya permintaan dalam negeri dan terapresiasinya nilai tukar rupiah, serta rendahnya inflasi kelompok Administered Price. Inflasi yang rendah juga disebabkan oleh keberhasilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan harga pangan.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Model yang dikembangkan dalam penyusunan usulan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 adalah sistem persamaan simultan dan data deskriptif usulan daerah yang dielaborasi dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Model dibangun pada tingkat provinsi, namun pola pergerakan penduduk dan pola pergerakan arus barang/jasa (kegiatan ekspor dan impor) belum tercover ke dalam model karena alasan keterbatasan data.

Pada tahun 2020, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi dan kesejahteraan, yang digambarkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi, tingkat pengangguran terbuka yang meningkat, dan tingkat kemiskinan yang juga mengalami peningkatan. Pada tahun tersebut dapat disimpulkan telah terjadi *structural break* perekonomian Indonesia, dimana hanya tingkat inflasi yang masih dalam batas target Pemerintah.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh sebesar sebesar 2.17 persen (*baseline*), skenario moderat tumbuh sebesar 3.64 persen, dan akan lebih tinggi dengan skenario optimis yaitu sebesar 4.35 persen. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5.31 persen, tingkat kemiskinan sebesar 8.71 persen dan tingkat inflasi diperkirakan sebesar 2.37 persen.

Usulan pokok-pokok kebijakan pembangunan daerah yang perlu menjadi program prioritas dalam RKP 2022, yang diolah berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat daerah yang dihimpun Anggota DPD RI, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Akselerasi Pemulihan Kesehatan Masyarakat:

a. Peningkatan SDM Kesehatan;
b. Penegakan Hukum Kesehatan; dan
c. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

2. Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL):

   a. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM;
   b. Penyaluran Bansos dan Subsidi Tepat Sasaran; dan
   c. Penguatan BUMDes untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

3. Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan:

   a. Perluasan Infrastruktur Dasar;
   b. Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antarmoda;
   c. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan; dan
   d. Akselerasi Transformasi Digital.

4. Pembangunan Ketahanan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Mitigasi Bencana:
    a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
    b. Peningkatan Mitigasi Bencana.
5. Penguatan Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan:
    a. Penguatan Sistem Hukum dan Upaya Anti Korupsi;
    b. Penanggulangan Radikalisme, Terorisme dan Peningkatan Keamanan Siber; dan
    c. Penanggulangan Narkoba dan Penguatan Kamtibmas.
6. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional:
    a. Peningkatan Ketersediaan Pangan Bagi Masyarakat;
    b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pangan Bagi Masyarakat; dan
    c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan Bagi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Asian Development Bank. 2020. *Asian Development Outlook What Drives Innovation In Asia? Special Topic: The Impact of the Coronavirus Outbreak—An Update*. Filipina: ABD.

Alawiyah, F., Susiana, S., Yuningsih, R., Martiany, D., & Lestari, T. R. P. 2019. *Penanggulangan Bencana dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Asmawi, A. 2009. *Memaknai Kembali Ketahanan Pangan*. Jurnal Ketahanan Nasional, 14(1), 77–87. https://doi.org/10.22146/jkn.22183

Bank Indonesia. 2020. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2020 (Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi).* Jakarta: BI.

Bank Indonesia. 2020. *Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2020 (Ekonomi, Moneter, dan Keuangan).* Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 2020. *Tinjauan Kebijakan Moneter Januari 2021 (Ekonomi, Moneter, dan Keuangan).* Jakarta: BI.

Bank Indonesia. 2021. *Publikasi Laporan Ekonomi Global 2020*. Jakarta: BI.

Bantacut, T. 2013. *Pembangunan Ketahanan Ekonomi dan Pangan Perdesaan Mandiri Berbasis Nilai Tambah.* Jurnal Pangan Perum Bulog, 22(2). http://www.jurnalpangan.com/index.php/pangan/article/view/87

Bappenas. 2020. *Laporan Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan IV Tahun 2020*. Jakarta. Bappenas

Batalgi, Badi H. 1995. *Econometric Analysis of Panel Data*; John Wiley & Sons.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik. 2021. *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020.* Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik. 2021. *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*. Jakarta: BPS

Corden, W. M. 1990. *Macroeconomic Policy and Growth: Some Lessons of Experience. Proceeding of The World Bank Annual Conference On Development Economic*. World Bank.

Aviliani. 2020. *Ekonomi Global dan Domestik 2020 Dampaknya Terhadap Dunia Usaha dan Masyarakat*. Institute for development of Economic and Finance (INDEF).

Egger, P. Pfaffermayr, M.; and Hannes Winner. 2005. An unbalanced spatial panel data approach to US state tax competition; Economics Letters, Vol. 88; pp. 329 – 335.

Fagi, A. M. 2014. *Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Ancaman: Strategi dan Kebijakan Pemantapan dan Pengembangan*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, 11(1), 11–25. https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.11-25

Gujarati, Damodar and Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*; 5th eds.; Palgrave Macmillan.

Indonesia.go.id. 2020. *Tak Satu pun Boleh Tercecer di Belakang*. 12 April 2021. https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/tak-satu-pun-boleh-tercecer-di-belakang

International Labour Organization. 2020. *World Employment and Social Outlook Trends* 2020. Jenewa: ILO.

Isbandi, & Rusdiana, S. 2014. *Strategi Tercapainya Ketahanan Pangan Dalam Ketersediaan Pangan di Tingkat Regional*. Jurnal Agriekonomika, 3(2), 117–132. https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v3i2.446

Kementerian PPN. 2016. *Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggaldan Kawasan Perbatasan dalam Lingkup RPJMN 2015-2019.* http://kawasan.bappenas.go.id/images/data/Produk/PemantauanEvaluasi/2016/Laporan_Akhir_2016_7.pdf

Kementerian PPN/Bappenas. 2020. *Penyusunan Rancangan RKP 2022*: Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Banten Tahun 2022. Bappeda Pemprov. Banten

Kementerian PPN/Bappenas. 2021. *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia (Triwulanan) IV Tahun 2020*. www.bappenas.go.id

Knowledge Sector Initiative. 2018. *Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia.* Working Paper 27. Kementerian PPN/ Bappenas & Australia Government.

Kusmanto, H. 2016. *Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional.* Jurnal Kajian Lemhannas RI, 4(1), 13–23. http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/137

Lindauer, D. L. and Ann D.V. 1992. *Government Spending in Developing Countries. The World Bank Research Observer* Vol. VII, No. 1 (January). The World Bank.

Lopez-Pueyo, C.; Barcenilla-Visus, S. and J. Sanau. 2008. *International R&D spillovers and manufacturing productivity: A panel data analysis*; Structural Change and Economic Dynamics. Vol. 19; pp. 152–172

Lucas, Robert E. Jr. 1988. *On the Mechanics of Economic Development*. Journal of Monetary Economics.

Marlinah, L. (2017). *Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif.* Jurnal Cakrawala, 17(2). https://doi.org/10.31294/jc.v17i2.2488

Media Aliansi Indonesia. 2017. *Mewujudkan Stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan Menuju Masyarakat yang Adil, Makmur dan Sejahtera.* 1 April 2021. https://media.aliansiindonesia.id/tabloid/baca/1499664845/media-aliansi-indonesia-edisi-ke-8

Pindyck, R. S. and D. L. Rubinfeld. 1991. *Econometric Models and Economic Forcasts. Third Edition*. McGraw-Hill Inc, New York.

Prihatin, R. B. 2018. *Disaster Awareness Society: Lesson Learned from Karo, Banjarnegara and Japan*. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 9(2), 221–239. https://doi.org/0.22212/aspirasi.v7i1.1084

Pusat Kajian Daerah dan Anggaran. 2021. *Rekapitulasi Asmasda Periode September 2020-April 2021.* www.publikasmasda.dpd.go.id.

The Economist Group. 2020. *Rankings and Trends: Explore the Year-on-Year Trends for the Global Food Security Index (Figures are from Annual Baseline Model).* 1 April 2021. https://foodsecurityindex.eiu.com/Index

The Food and Agriculture Organization (FAO). 2006. *Food Security.* http://www.fao.org/fileadmin/templates/faoitaly/documents/pdf/pdf_Food_Security_Cocept_Note.pdf

Wooldrige, J. M. 2006. *Introductory Econometric*: *A Modern Approach; 2nd eds.; Thomson.* South Western.

ISBN 978-623-95896-3-9